KORAN BERNAS
www.koranbernas.id
JUJUR - KONSTRUKTIF - BERETIKA

PT RAJAWALI SIAGA
Butuh Jasa Pengamanan?
Hubungi: (0274) 583831

Ekober
ePaper Koran Bernas
TAHUN KE-4
EDISI KE 9/2021
SENIN WAGE 29 MARET 2021
15 RUWAH1954 JIMAKIR

SMS Vaksinasi di Layar LCD Retak

KORANBERNAS.ID, YOGYAKARTA -- Titik Puspaningrum terduduk lemas di kursi antrean RSIA Rachmi, Selasa (16/3/2021) lalu. Harapannya untuk mendapatkan vaksin Covid-19 pupus sudah.

Jauh-jauh naik ojek online sedari pukul 08.00 WIB, wanita 55 tahun ini ternyata tak bisa ikut disuntik bersama lansia lainnya. Padahal dia mendapatkan pesan singkat di ponselnya yang menyebutkan Titik jadi satu dari sekian lansia yang mendapatkan jatah vaksinasi lansia.

Sembari memperlihatkan ponsel yang retak LCD-nya, wanita ini mengaku ditolak vaksinator karena namanya tak masuk dalam daftar lansia penerima vaksin. Meski sudah menunjukkan pesan singkat tersebut pada vaksinator, Titik tetap tak mendapatkan layanan vaksinasi yang sangat diharapkannya.

Titik tak juga mendapatkan informasi secara jelas kenapa dia mendapatkan SMS. Selain tak masuk daftar, usianya yang belum masuk kategori lansia jadi masalahnya.

"Katanya nama saya tidak terdaftar. *Lha kok* saya dapat SMS dari klinik ini untuk ikut vaksin hari ini. Padahal dari pagi sudah ke sini dan panas-panas antri," ungkapnya.

Persoalan lain dihadapi Ketua RT 43, RW 11, Kampung Jogoyudan, Widiatmo. Mengantar sejumlah warga lansia untuk ikut vaksinasi, empat orang warganya hampir saja batal divaksin. Alasan yang diterimanya tak masuk akal. Keempat lansia warganya yang berusia diatas 70 tahun tak punya nomor *handphone* sehingga tak bisa mendaftar sebagai peserta vaksinasi.

ILUSTRASI: ERIK SUMANTORO/KORANBERNAS.ID

Alih-alih nomor dari operator, banyak warga lansia yang tak memiliki *handphone*. Selain gagap teknologi, banyak diantara mereka yang tak lagi bekerja dan bisa membeli *gadget*. Akhirnya pengurus RT berinisiatif memberikan nomor HP mereka sebagai penjamin para lansia.

"Sempat diminta beli nomor operator baru, tapi saya pertanyakan buat apa kalau tidak ada *handphone* demi bisa mendaftar jadi peserta vaksinasi. Masalah teknis semacam ini yang seharusnya tak perlu terjadi untuk lansia. Berjalan saja mereka susah, apalagi direpotkan hal-hal teknis seperti ini," tandasnya.

Kedua pengalaman para lansia tersebut mungkin hanya segelintir dari banyak masalah vaksinasi yang harus dihadapi. Padahal mereka merupakan kelompok rentan yang harus mendapatkan prioritas vaksinasi.

Kondisi kesehatan membuat mereka lebih rawan terpapar Covid-19. Apalagi bila para lansia mempunya komorbid atau penyakit penyerta. Kondisi kesehatan mereka akan lebih mudah *drop* atau menurun saat terpapar virus tersebut.

Padahal dari hasil survei *Center for Strategic and International Studies (CSIS)* yang dilakukan pada 13-18 Januari 2021 di DIY, kelompok lansia paling besar mempercayai kemanjuran vaksinsi Covid-19. Bahkan angkanya mencapai lebih dari 75,7 persen responden.

Dari hasil survei tersebut disebutkan, jumlah ini jauh lebih besar dibandingkan kelompok usia produktif. Sebanyak 44,4 persen Gen Z atau kelompok usia 17-22 tahun percaya akan kemanjuran vaksin

Bersambung ke hal 2

Salah Hitung Menuju *Herd Immunity*

KORANBERNAS.ID, YOGYAKARTA – Vaksinasi yang saat ini gencar dilakukan di seluruh negeri, bertujuan untuk memperoleh kekebalan komunitas (*herd immunity*) yang secara teori ilmiah menjadi syarat mengendalikan pandemi Covid-19. Teori menyebut, *herd immunity* akan tercapai jika 70% populasi penduduknya telah mendapatkan vaksinasi.

Pemerintah mentargetkan 180 juta penduduk, sekitar 70% dari total penduduk Indonesia, mendapatkan vaksinasi Covid-19 untuk mencapai *herd immunity*. Persoalannya, dengan mengandalkan vaksin Sinovac yang efikasinya sekitar 65%, apakah vaksinasi terhadap 180 juta warga itu sudah bisa mencapai *herd immunity*? Efikasi adalah persentase penurunan kejadian penyakit pada kelompok orang yang divaksinasi saat penelitian (uji klinis).

Untuk menjawab pertanyaan mendasar tersebut, koranbernas.id mewawancarai pakar epidemiologi Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Dr Riris Andono Ahmad.

Berikut petikan wawancaranya:

Seberapa efektif pelaksanaan vaksinasi untuk melawan pandemi Covid-19?

Efikasi vaksin sudah kelihatan dari pabriknya. Tapi nanti *kan* itu juga tergantung seberapa efektif kemampuan pemerintah untuk mengimplementasikan dengan cepat dan mencapai target 180 juta itu, yakni sekitar 70% dari jumlah penduduk yang ada di Indonesia.

Karena efikasinya 65%, maka 70% populasi itu belum mencapai *herd immunity*. Karena

Bersambung ke hal 2

Navigasi

Senjata Sisa Perang

Ada cerita menarik seputar masih adanya senjata sisa Perang Dunia II yang masih dipakai hingga saat ini.

HAL 3

KBM Luring Maju Mundur

Sri Sultan HB X Beberapa lalu memilih menggelar KBM terbatas untuk SMA/SMK alih-alih kampus dengan sejumlah pertimbangan.

HAL 5

SMS Vaksinasi...

Sambungan dari hal 1

Covid-19 untuk mencegah penularan virus corona.

"Persoalan semacam ini bisa diatasi pengambil kebijakan. Sebab dimungkinkan masalah yang sama juga dihadapi para lansia lainnya di tempat lain, kan kasihan," ungkapnya.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DIY, Pembajun Setyaningastutie, menyampaikan Pemda saat ini memang tengah menyelesaikan vaksinasi tahap kedua, termasuk untuk para lansia. Ditargetkan tahapan tersebut bisa selesai pada Juni 2021 mendatang.

Vaksinasi lansia dilakukan di Kota Yogyakarta terlebih dahulu. Ditargetkan sekitar 45 ribu lansia yang ikut divaksin di Kota Yogyakarta. Menyusul empat kabupaten lain dengan total 295 ribu lansia.

"Vaksinasi untuk lansia memang awalnya diperuntukkan bagi warga di ibukota, dalam hal ini kota Yogyakarta, kemudian nanti disusul kabupaten lain. Ditargetkan tahap kedua bisa selesai pada Juni [2021] nanti," jelasnya.

Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Pemda DIY, Berty Murtinigsih, menambahkan setiap penerima vaksinasi memang lebih baik memiliki satu nomor HP, termasuk para lansia yang menjadi penerima vaksin. Sebab hal ini terkait dengan sertifikat vaksinasi dan informasi vaksin kedua yang akan mereka terima.

DOK KORANBERNAS.ID

Vaksinasi lansia Kota Yogyakarta yang dilaksanakan di RS Pratama beberapa waktu lalu.

"Tetapi setiap wilayah mempunyai kebijakan untuk pelaksanaan dan kemudahan akses pelayanan pada sasaran," paparnya.

Ketiban Sampur

Wakil Walikota Yogyakarta sekaligus Ketua Harian Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Yogyakarta, Heroe Poerwadi, mengungkapkan lansia di Kota Yogyakarta memang "ketiban sampur" atau terpilih menjadi penerima vaksin. Semua lansia di Kota Yogyakarta terpilih menerima vaksin tahap kedua ini.

"Dari target sekitar 45 ribu lansia, sekitar 18 ribu lansia sudah melaksanakan vaksinasi tahap pertama. Sedangkan vaksinasi kedua rencananya akan diikuti sekitar 20 ribu lansia," jelasnya.

Munculnya masalah para lansia tersebut, menurut Heroe, karena persoalan teknis undangan. Data yang pertama adalah otomatisasi aplikasi milik Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Sedangkan undangan kedua dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Yogyakarta.

Pemkot mencoba mengatasi persoalan ini dengan mengkoordinasikan undangan dari aplikasi Kemenkes dengan daerah. Koordinasi dilakukan bersama dengan komisaris daerah lansia, baik di kota kecamatan dan kelurahan. Selanjutnya RT/RW ini juga secara kolektif melakukan pendaftaran lansia di daerah mereka masing-masing.

Vaksinasi lansia diprioritaskan untuk dilaksanakan di RS. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi jika terjadi KejadianIkutanPascaImunisasi (KIPI) atau yang lainnya.

"Maka lansia kita dorong untuk vaksinasi di rumah sakit saja. Sementara untuk Puskesmas adalah kelompok yang masuk ke kategori pelayanan publik," jelasnya.

Pelayanan vaksinasi Covid-19 bagi warga lansia di Kota Yogyakarta dapat diakses di 11 rumah sakit serta dua Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak yang ditunjuk pemerintah. Warga lansia yang sudah mendaftar untuk mengikuti vaksinasi diminta rutin mengecek jadwal dan lokasi vaksinasi mereka melalui corona.jogjakota.go.id, cukup dengan memasukkan nomor induk kependudukan.

(yve/rne)

Salah Hitung...

Sambungan dari hal 1

70% itu *kan* yang punya imunitas. Jadi, karena efikasinya hanya 60% maka yang punya imunitas sebenarnya itu berarti 70% kali 65%.

Nah, itu kemungkinan menjadi sulit untuk mencapai *herd immunity*. Selain itu adalah durasi imunitas. Untuk mencapai *herd immunity,* harus mencapai durasi imunitas vaksinnya. Dan kita belum tahu seberapa lama durasi imunitasnya. Kalau misalnya target vaksin tercapai lebih panjang dari durasi imunitas vaksinnya, maka kita tidak akan pernah mencapai *herd immunity*.

Untuk mencapai *herd immunity*, maka vaksin harus mencapai target dalam satu tahun. Vaksin cukup efektif untuk membuat pandemi terkendali. Artinya, Covid-19 tetap ada tapi tidak separah sekarang. Misalnya orang dapat bekerja lagi, yang terinfeksi berkurang dan rumah sakit tidak keberatan (penuh). Itu akan tetap efektif. Tapi bukan untuk menghentikan pandemi.

Artinya, protokol kesehatan harus tetap dilakukan?

Protokol kesehatan (harus) terus (dilakukan). Karena efikasinya hanya 65%, kita tetap bisa kena.

DOK KORANBERNAS.ID

Petugas kesehatan mempersiapkan dosis vaksin yangakan disuntikkan.

Berapa waktu yang dibutuhkan untuk mencapai target vaksinasi?

Dulu Pak Menteri bilang satu setengah tahun. Tapi menurut saya itu terlalu ambisius jika melihat (kondidi) Indonesia. Tapi sekarang melihat upaya dan kampanye cukup gencar, saya tidak bisa membuat prediksi dengan baik apakah itu tercapai atau tidak. Kecuali kalau kita negara kecil seperti Israel, relatif cepat dan tercapai. Atau seperti Amerika yang (vaksinasinya) dapat mencapai satu juta dosis per hari.

Ada beberapa jenis vaksin yang digunakan di Indonesia. Adakah pengaruhnya?

Gak apa-apa karena kebutuhan vaksin tidak bisa dipenuhi oleh satu jenis vaksin saja. Ini hanya masalah *supply* dan *demand* saja, dan urgensi *demand* yang mendesak.

Bagaimana jika masyarakat urung untuk vaksinasi tahap awal karena lebih mantep Astrazenecca daripada Sinovac?

Ya itu terserah masyarakat. Yang jelas, risiko tertular semakin kuat, karena semakin dia menunda vaksinasi *kan* semakin membuat dirinya semakin memiliki risiko tertular (yang) tinggi. Karena secara fungsi sama *aja, cuman* efikasinya berbeda. Tapi dengan efikasinya berbeda, tidak serta merta vaksinnya berarti lebih baik. **(rne)**

Cerita Tentara dan Senjata Sisa Perang Dunia

KORANBERNAS.ID, YOGYAKARTA – Tentara tak bisa dipisahkan dengan senjata. Di balik pesatnya perkembangan alat utama sistem persenjataan (alutsista) ada cerita menarik seputar masih adanya senjata sisa Perang Dunia II yang masih dipakai hingga saat ini.

Fakta ini terungkap saat Komisi I DPR RI melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Korem 072/Pamungkas Yogyakarta, Kamis (17/3/2021).

Usai mendengarkan paparan dari Komandan Korem (Danrem) 072/Pamungkas Brigjen TNI Ibnu Bintang Setiawan, anggota Komisi I DPR RI Letjen TNI (Purn) Lodewijk Friedrich Paulus, kaget karena senjata lawas yang digunakan pada Perang Dunia (PD) II masih dipakai prajurit TNI Korem 072/Pamungkas Yogyakarta. Lodewijk heran senjata tersebut belum masuk gudang alias dipensiunkan.

Senjata yang dimaksud mantan Danjen Kopassus ini di antaranya senapan *Lee Enfield* buatan Inggris dan peluncur roket buatan bekas negara adidaya Uni Sovyet yaitu *Boyevaya Mashina 14* atau *BM-14*.

"Saya sebagai mantan prajurit sedih. *Kok* masih ada senjata LE dan senjata BM di satuan ini. Dengan perwira yang ada di depan saya ini jauh lebih tua senjata itu daripada Anda sekalian. Betul, *kan*?" tanya Lodewijk yang dinyatakan benar oleh para perwira jajaran Korem 072/Pamungkas.

Lee Enfield merupakan senjata standar AD Inggris sejak adopsi pertamanya pada 1895 sampai 1957. Namun, senjata itu tidak lagi digunakan. Sedangkan BM-14 sudah lama tak dipakai, termasuk di negara-negara bekas Blok Timur. Terakhir, angkatan bersenjata Aljazair menggunakan peluncur roket BM-14 pada 1993 selama berlangsungnya perang saudara di negara tersebut.

ROSIHAN ANWAR/KORANBERNAS.ID

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid saat memimpin anggotanya kunker ke Korem 072/Pamungkas Yogyakarta.

"Mungkin seharusnya itu senjata dimusnahkan saja, tapi kalau untuk upacara bolehlah. Tapi kalau itu (LE dan BM-14) dimasukkan sebagai alutsista, itu sudah terlalu jauh ketinggalan. Bayangkan Pindad saja (senapan) sudah SS-3, ini *kok* masih seperti ini," ungkap pria yang juga menjabat Sekjen Partai Golkar itu.

Wajib diperbarui

Usai audiensi, Lodewijk berharap TNI menerapkan program minimum *essential force*. "Saya tidak bisa membayangkan kalau Korem di Jawa saja seperti ini, bagaimana dengan Korem di Pulau Sumatera seperti Lampung dan daerah lainnya," katanya.

Eks Danjen Kopassus ke-24 itu meminta seluruh matra TNI tak lagi menggunakan senjata usang demi kepentingan pertahanan dan keamanan.

Lodewijk justru mendorong TNI mengajukan tambahan anggaran untuk memperbarui alutsista yang dimiliki. "Saran saya kembalikan saja ke Denpal dan dengan alasan kuantitatif, satuan TNI kekurangan, sehingga bisa meminta penambahan (senjata)," tandasnya.

Danrem 072/Pamungkas Brigjen TNI Ibnu Bintang Setiawan, mengakui sejumlah alutsista yang ada merupakan senjata sisa PD II. Pihaknya tidak kunjung memusnahkan atau memensiunkan persenjataan tersebut, karena tidak adanya instruksi Mabes TNI AD. "Selama masih bisa bunyi, kami pakai. Mungkin (penambahan alutsista) saat ini belum menjadi prioritas Mabes," ujarnya.

Ibnu secara langsung mengakui, peralatan dan perlengkapan persenjataan yang ada saat ini masih belum mencukupi bagi jajaran Korem 072 Pamungkas yang memiliki 10 Kodim dan sejumlah batalyon serta detasemen.

Selain itu, ada pula beberapa jenis alutsista baru yang didatangkan dari Tiongkok ternyata memakan korban dan kini tak lagi digunakan.

"Saya akui untuk anggota saya saja masih kurang. Terkadang latihan menembak harus berganti-ganti. Ada juga satu senjata alutsista baru, sempat kami gunakan malah memakan korban anggota kami sendiri. Saat ini tidak boleh dipergunakan lagi," paparnya.

Rumah prajurit

Tak hanya senjata, pada kunker itu Komisi I DPR RI juga menemukan fakta lebih dari 30 persen rumah prajurit TNI Tak layak huni.

Menurut Lodewijk, pemerintah harus lebih serius memperhatikan kesejahteraan prajurit TNI. Salah satunya terkait permasalahan papan atau perumahan prajurit.

"Saya tak tahu jumlah pastinya, tapi dari pengalaman saya, lebih dari 30 persen rumah prajurit itu yang tidak layak huni," ujar purnawirawan TNI berpangkat Letjen tersebut.

Dia menegaskan banyak rumah dinas prajurit saat ini perlu diperbaiki atau direnovasi segera mungkin. "Yang paling menarik di sini adalah rumah prajurit di Batalyon 403 itu dibenahi, ini menyangkut moral prajurit. Bisa dibayangkan, rekan-rekan kita yang saat ini bertugas di Papua mendengar rumah mereka sudah bagus, sudah asri, nyaman, tentu menambah moral mereka," katanya.

Pemerintah perlu mengalokasikan secara khusus anggaran penyediaan rumah dinas prajurit dan anggaran renovasi. Hunian yang layak akan berpengaruh pada mental para prajurit TNI.

"Bayangkan kalau sudah musim hujan, anak istri ditinggal tugas, terus kalau rumahnya seperti itu si prajurit tidak bisa konsentrasi melaksanakan tugas karena memikirkan garis belakang. Itulah tugas-tugas sebagai pembina matra ini untuk memikirkan anak buah," tandasnya.

Danrem 072 Pamungkas Brigjen TNI Ibnu Bintang Setiawan mengungkapkan, pihaknya telah berupaya memperhatikan kesejahteraan prajurit meski dengan anggaran minim. "Kami berupaya terus, seperti memperbaiki rumah-rumah dinas di Batalyon 403," katanya.

Selain kebutuhan rumah dinas yang layak, prajurit TNI khususnya Babinsa yang bertugas di Korem 072/Pamungkas juga membutuhkan kendaraan dinas yang layak.

Sebagian wilayah Korem 072/Pamungkas bertopografi pegunungan ataupun perbukitan. "Saya jadi ingat, anak buah kami Babinsa itu belum semuanya memiliki motor karena daerah kami bergunung-gunung. Kami sangat berharap memiliki motor untuk membagi sembako ke masyarakat di pegunungan. Kalau Babinsa memiliki motor ini akan sangat membantu," kata Ibnu.

Rombongan Komisi I DPR RI dipimpin Ketua Komisi I Meutya Hafid melakukan kunjungan kerja ke Yogyakarta untuk meninjau kesiapan satuan tempur dan kondisi alutsista yang dimiliki serta kondisi kesejahteraan prajurit di Jawa Tengah dan DIY.

"Kami di sini untuk memantau kesiapan pasukan, kekuatan tempur dan alutsista TNI serta menanyakan soal kesejahteraan prajurit. Kesejahteraan prajurit termasuk poin yang kami tanyakan," kata Nurul Arifin, anggota Komisi I DPR RI itu. **(ros)**

ROSIHAN ANWAR/KORANBERNAS.ID

Anggota Komisi I DPR RI berbincang dengan jajaran Korem 072/Pamungkas Yogyakarta.

Aksara Jawa Bangkit dari Tidur Panjangnya

KORANBERNAS.ID, YOGYAKARTA – Hampir satu abad sejak Kongres Aksara Jawa di Sriwedari Solo pada tahun 1922, perkembangan aksara Jawa seperti terlepat dalam tidur panjangnya. Perhelatan Kongres Aksara Jawa (KAJ) I Yogyakarta, 22-26 Maret 2021 di Hotel Grand Mercure Yogyakarta, menjadi pembuka lembaran sejarah baru bagi bangkitnya aksara warisan nenek moyang itu.

Kongres tersebut sekaligus momentum yang sangat tepat untuk melakukan upaya-upaya pembaruan. Seiring perkembangan zaman, huruf Jawa Hanacaraka tidak cukup hanya berjumlah 20. Tak hanya itu, aksara Jawa juga harus bisa masuk dunia digital, supaya tak hilang tergerus zaman.

Gubenur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengakui supaya bahasa dan aksara Jawa tetap hidup maka harus dihidupi oleh penuturnya secara aktif. Harapan dia, semoga rekomendasi kongres mampu menggugah kebangkitan dan menjadi wahana menghidupkan Bahasa dan Aksara Jawa dalam keseharian.

Sebenarnya, tatkala Kongres Bahasa Jawa ke-3 di Yogyakarta 2001, Raja Keraton Yogyakarta ini sudah menengarai bahasa Jawa bagaikan kerakap tumbuh di atas batu. KAJ I kali ini diharapkan mampu menaikkan minat baca-tulis aksara Jawa.

Dia mengatakan, Pemda DIY sudah melakukan beragam upaya antara lain melalui Digitalisasi Aksara Jawa pada 5 Desember 2020. Sebelumnya pada 2013 dan 2014 diluncurkan Aplikasi Baca-Tulis Aksara Jawa Versi 1.0 dan Versi 2.0.

Upaya lain, setiap kantor wajib menuliskan aksara Jawa maupun penggunaan busana dan bahasa Jawa pada kantor-kantor pemernmtahan setiap *Kemis-Paing*, sekaligus menandai peringatan haul Pahlawan Nasional Sri Sultan Hamengku Buwono IX.

Mengutip Barbara Grimes, Sultan menyatakan fenomena kepunahan bahasa daerah terjadi karena banyak faktor, di antaranya penurunan drastis jumlah penutur aktif. Pnggunaannya semakin berkurang.

"Jika bahasa daerah hanya digunakan oleh penutur berusia 25 tahun ke atas dan usia yang lebih muda tidak menggunakannya, jangan disesali jika 75 tahun ke depan atau tiga generasi, bahasa itu akan terancam punah," kata Sultan. Umur satu generasi 25 tahun.

SHOLIKUL HADI/KORANBERNAS.ID

Konferensi pers Kongres Aksara Jawa (KAJ) I Yogyakarta 22-26 Maret 2021 di Hotel Grand Mercure Yogyakarta.

Mengutip data UNESCO, terdapat 2.500 bahasa di dunia termasuk bahasa-bahasa daerah di Indonesia terancam punah. Dari jumlah itu, lebih 570 bahasa statusnya sangat terancam punah dan lebih 230 bahasa telah punah sejak 1950.

Berdasarkan data Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI), Sultan menyebutkan, dari 718 bahasa daerah di Indonesia, 169 terancam punah karena jumlah penuturnya kurang dari 500 orang. Agar bisa bertahan, bahasa harus digunakan minimal 10 ribu orang untuk memastikan transmisi antargenerasi.

Hingga saat ini, baru ada tujuh aksara terdaftar di *Unicode* antara lain aksara Jawa (*Hanacaraka*) dan aksara Arab *Pegon* yang banyak terdapat dalam manuskrip berupa *Serat, Babad* dan *Kidung* di Museum Widya Budaya Keraton Yogyakarta.

PANDI bekerja sama dengan Keraton Yogyakarta serta Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menemukan fakta, bahasa daerah di dunia yang bisa diakses secara *online* kurang dari lima persen.

Sultan berharap orang tua tak perlu memaksa anak-anaknya mempelajari bahasa yang dianggap bergengsi, misalnya bahasa Inggris. Demi ketahanan bahasa daerah, siswa dianjurkan belajar bahasa etnis terlebih dulu sebelum mengenal bahasa asing. "Kita seharusnya mendorong penggunaan bahasa daerah agar tetap hidup, terutama di lingkungan keluarga," kata Sultan.

Seperti halnya aksara Mesir kuno, *hierogliph*, sebenarnya aksara Jawa tidak tertinggal jauh dalam memasuki era digital, karena 26 tahun lalu telah terdaftar di *Unicode*.

Keinginan serupa disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim. Sebagai upaya memperkaya kebudayaan Indonesia mau tak mau pelestarian aksara Jawa mutlak dilakukan.

Diakui, aksara Jawa saat ini sedang bertahan susah payah di tengah-tengah penggunaan aksara Latin. Melalui teknologi digital diharapkan aksara Jawa makin berkembang.

Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo bahkan punya keinginan berdiskusi dengan pegiat aksara Jawa sekaligus menyampaikan *urun rembug* demi kemajuan aksara Jawa pada era digital.

Semua pihak harus bersedia berkaca sampai sejauh mana eksistensi aksara Jawa. "Adiluhung saja tidak cukup. *Muspra*, jika kebudayaan ini tidak bisa *ngrembaka*," kata dia.

Ganjar berharap KAJ I Yogyakarta mampu memberi rumusan yang tepat, ibarat peta petunjuk jalan bagi pengembangan aksara Jawa. "Kami di Jawa Tengah menantikan gagasan-gagasan cemerlang *panjenengan*. Agar *awake dhewe ora kelangan Jawa-ne*," kata Ganjar.

Menjawab kekhawatiran sekaligus tantangan tersebut, Kepala Dinas Kebudayaan (Disbud) DIY Sumadi didampingi Kepala Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman Disbud DIY Rully Andriadi serta Ketua Panitia Kongres, Setya Amrih Prasaja, menegaskan KAJ I Yogyakarta merupakan jawabannya. "Kekhawatiran itu kita jawab dengan kongres ini," kata Sumadi.

KAJ I Yogyakarta merupakan upaya membangun fondasi untuk menguatkan wadah besar pengembangan aksara Jawa. Satu-satunya cara mempertahankan aksara Jawa adalah digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kata kuncinya, pada era digital saat ini aksara Jawa harus bisa abadi di dunia maya, setara dengan yang lain.

Aspek sejarah

KAJ I Yogyakarta juga diisi sambutan perwakilan UNESCO secara virtual membuktikan event ini tidak lepas dari aspek kesejarahan. Selain itu, juga dilandasi keprihatinan generasi masa kini kurang memahami aksara Jawa. "Kami prihatin dengan minimnya penggunaaan aksara bahkan ada yang tidak kenal lagi," ungkap Sumadi.

Menurut dia, Kongres Aksara Jawa I Yogyakarta diselenggarakan sebagai bagian dari refleksi kesejarahan. Sejak 1922 hingga hari ini belum ada lagi kongres serupa yang fokus membahas aksara Jawa sampai level teknis.

KAJ I Yogyakarta juga dilatari keprihatinan minimnya penggunakan aksara Jawa di kalangan masyarakat, bahkan sebagian dari mereka tidak mengenal lagi aksara warisan leluhur tersebut. "Atas dasar keprihatinan inilah, Dinas Kebudayaan DIY menginisiasi diadakannya KAJ I sebagai bentuk tanggung jawab kebudayaan," kata Sumadi.

Kongres Aksara Jawa I Yogyakarta diikuti peserta lebih dari 1.000 orang. Peserta luring sejumlah 110 orang terdiri wakil akademisi, praktisi, budayawan, birokrat, dan masyarakat umum. Peserta daring 800 peserta terbagi 200 peserta komisi I, 200 komisi II, 200 peserta komisi III dan 200 peserta komisi IV.

Selain dari DIY, peserta juga datang dari Jateng, Jatim, Jabar, Banten, DKI, Bali, Sumatra, Kalimantan serta Hongkong. Diaspora Jawa yang tersebar di seluruh dunia juga mengikuti jalannya kongres.

Rully Andriadi menambahkan, penggunaan aksara Jawa saat ini sebagian besar baru sebatas untuk dekoratif dan aspek kesejarahan. Sedangkan penggunaan sehari-hari masih jauh dari harapan. "Ini tantangan kita bersama. Satu-satunya cara adalah kita gunakan kembali aksara Jawa," ucapnya.

Beruntung, DIY sudah mempelopori penggunaan aksara warisan nenek moyang ini dimulai dari kop surat instansi Pemda DIY, papan nama instansi serta nama jalan. Lahirnya perda tentang aksara Jawa diharapkan mampu menjadikan penggunaan aksara Jawa lebih meluas lagi.

Kongres Aksara Jawa I Yogyakarta juga diisi *Talk Show* dengan narasumber KPH Notonegoro (Penggagas Kongres Aksara Jawa I), Prof Dr Yudho Giri Sucahyo selaku Ketua PANDI dan Badan Standadrisasi Nasional dengan tema Digitalisasi Aksara Jawa.

Setya Amrih Prasaja menyatakan terdapat dua poin penting dasar penyelenggaraan KAJ I yakni keprihatinan serta penghargaan atas upaya digitalisasi Aksara Jawa yang memungkinkan aksara ini dapat digunakan dalam platform digital manapun. Harapannya, tumbuh kesadaran baru pentingnya penggunaan aksara Jawa dalam konteks komunikasi sosial di era digital.

Menurut dia, ada empat isu penting akan dibahas dalam forum KAJ I. Pertama, pembahasan tentang transliterasi aksara Jawa-Latin. Kedua, pembahasan tata tulis aksara Jawa yang akan fokus *paugeran* (tata tulis) termasuk di dalamnya tinjauan terhadap *paugeran-paugeran* penulisan aksara Jawa yang pernah ada dan masih digunakan. Tujuannya agar bisa disinkronkan dengan kebutuhan penulisan aksara Jawa era digital.

Ketiga, digitalisasi aksara Jawa termasuk di dalamnya teknis penyiapan *platform* digital aksara Jawa, standardisasi *type face* aksara Jawa (*fonta*) serta standardisasi papan ketik aksara Jawa.

Keempat, pembahasan kebijakan tentang aksara Jawa agar bisa diimplementasikan secara nyata antara lain menyentuh level kebijakan dan penggunaannya pada level ranah publik.

Baik Sumadi, Rully maupun Amrih sepakat KAJ I diharapkan mampu mengubah persepsi publik supaya tidak lagi menganggap aksara Jawa ibarat momok atau memedi yang menakutkan. Perlu dicarikan solusi supaya generasi milenial kesengsem dengan aksara warisan leluhur itu. **(sol)**

KBM Luring masih Maju Mundur

KORANBERNAS—Pemerintah kembali memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro yang diikuti Pengetatan secara Terbatas Kegiatan Masyarakat mulai 23 Maret hingga 5 April 2021 mendatang. Salah satu kebijakan pun muncul, yakni perguruan tinggi mulai diperbolehkan menggelar Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) luring atau tatap muka meski secara terbatas.

Kebijakan baru ini sempat tak disetujui Gubernur DIY, Sri Sultan HBX. Beberapa lalu Sultan memilih menggelar KBM terbatas untuk SMA/SMK alih-alih kampus dengan sejumlah pertimbangan.

Diantaranya sebagian besar mahasiswa berasal dari luar daerah yang dikhawatirkan meningkatkan potensi penularan Covid-19. Padahal saat ini DIY masih berjuang untuk menangani penularan virus dan memulihkan perekonomian pasca pandemi.

Namun kemudian Sultan akhirnya mengijinkan kampus menggelar KBM luring terbatas. Pemda menyelesaikan proses penyusunan Instruksi Gubernur (Ingub) terkait perpanjangan PTKM Mikro sebagai tindak lanjut terbitnya Instruksi Kemendagri.

"[Gubernur] sudah mengizinkan [kampus dibuka], Setelah Ingub terbit, maka kampus-kampus bisa mulai menyiapkan diri," papar Sekda DIY, Baskara Aji di Kanto Gubernur DIY, Senin (22/03/2021).

Aji mengungkapkan, aturan terkait penerapan protokol kesehatan (prokes) di kampus diatur secara lebih rinci melalui ingub. Kampus harus memastikan diri menerapkan aturan prokes dan pembatasan

Kampus yang sudah siap menggelar KBM terbatas tidak perlu mengajukan izin kepada Gugus Tugas. Namun mereka wajib mematuhi segala ketentuan prokes yang ditetapkan mulai dari pembatasan jumlah mahasiswa yang masuk, waktu kuliah yang tidak lama hingga penyediaan sarana dan prasaranan penerapan prokes.

ISTIMEWA
Siswa Sekolah Dasar melakukan antrian dan pemeriksaan masker sebelum masuk kelas.

"Saya sudah konsep Ingub-nya mungkin sudah ditandatangani [gubernur]. Itu akan kita dampingi dengan SE kepada OPD dan institusi pusat," jelasnya.

Terkait aturan mahasiswa dari luar daerah, kampus diminta menerapkan sistem blended learning. Yakni memadukan antara pembelajaran luring dan daring selama KBM.

Pemda melakukan pengawasan secara berkala. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 di tingkat kampus.

"Nanti khusus mahasiswa asal luar daerah bisa menerapkan pembelajaran daring, bisa lewat zoom, youtube dan lainnya. Tidak perlu datang langsung ke kampus. Karenanya perguruan tinggi yang menggelar kuliah luring wajib mengutamakan prokes. Itu [prokes diatur oleh Perda dan Perkada," ungkapnya.

Vaksinasi Guru

Sementara KBM di tingkat pendidikan dasar dan menengah masih dalam kajian. Pemda tidak akan gegabah membuka sekolah tanpa persiapan. Paling cepat KBM luring terbatas digelar pada Juli 2021 mendatang.

Pemda memastikan guru-guru dan tenaga kependidikan mendapatkan vaksinasi terlebih dahulu. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mengantisipasi penularan virus di.

"KBM luring diuj-cobakan ke sekolah-sekolah menengah yang diutamakan gurunya sudah divaksin," papar Aji.

Dinas Pendidikan di kabupaten/kota juga harus memastikan membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) KBM Luring. Pelaksanaan SOP tersebut harus disesuaikan protokol kesehatan (prokes) di masa pandemi ini.

Hal ini penting mengingat sekolah bisa saja mengatur siswa untuk mentaati prokes saat di kelas. Namun saat mereka tidak berada di kelas ataupun sekolah, maka sekolah ataupun orang tua akan kesulitan melakukan pengawasan.

"Kita tidak boleh tatap muka seperti dulu, sekarang beda karena pandemi," tandasnya.

Namun sekolah nantunya bisa menyelenggarakan ujian secara luring, khususnya untuk ujian akhir. Hal ini mengingat ujian tidak diikuti seluruh siswa sekolah secara bersamaan. Saat ujian akhir digelar bagi siswa kelas tertentu, maka kelas lain akan diliburkan.

"Tapi kalau ujian bersamaan, tidak mungkin dilakukan bersamaan. Kalau mau ada ujian tatap muka langsung maka harus diatur jamnya. Kalau waktunya lebih panjang maka soalnya harus dibuat berbeda bobotnya," ungkapnya.

Secara terpisah Wakil DPRD DIY, Huda Tri Yudiana mengungkapkan rencana kampus diizinkan untuk memulai tatap muka di DIY sangat bagus. Kebijakan tersebut selain meningkatkan kualitas pendidikan juga akan mendukung perekonomian di DIY.

Apalagi PDRB DIY lebih dari 60 persen bertumpu pada sektor kampus dan pariwisata. Pandemi ini betul betul berdampak besar bagi perekonomian karena dua sektor utama ini menurun tajam.

"Kampus kulian online dan wisata menurin drastis. Kawasan sekitar kampus sangat terdampak, kost kost mahasiswa banyak kosong bahkan banyak dijual, warung makan, dan sektor ekonomi pendukung kampus lain sangat terdampak. Wajar jika pertumbuhan ekonomi tahun lalu bahkan sampai saat ini masih negatif. Dibukanya kembali kuliah tatap muka merupakan cara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi DIY," paparnya.

YVESTA PUTU/KORANBERNAS.ID
Sekda DIY, Kadarmanta Baskara Aji

Namun di sisi lain, pembukaan kuliah tatap muka jangan sampai meningkatkan kasus Covid-19 kembali di DIY. Kampus harus betul bet mempersiapkan metode tatatp muka, protokol kesehatan hinggasaranaprasarana serta berkoordinasi dengan warga sekitar kampus maupun stakeholder.

Hal itu penting untuk menjaga penularan Covid 19 akibat kebijakan ini. Kampus diyakni mampu melakukan itu semua karena mereka adalah para akademisi yang berpendidikan.

"Meskipun demikian kami akan tetap memantau pelaksanaan protokol kesehatan di kampus kampus," ungkapnya.

Selain itu pemda perlu mendukung dengan memprioritaskan vaksinasi untuk civitas akademika yang terlibat. Kondisi ini para dosen, karyawan dan civitas akademika perlu didahulukan program vaksinasinya.

Sebab mereka akan berhadapan dengan mahasiswa dari berbagai daerah. Tidak sedikit pula dosen yang lanjut usia sehingga beresiko tinggi.

"Pemda sebaiknya segera berkoordinasi untuk vaksinasi kampus ini, agar bisa segera terlaksana dan masuknya mahasiswa tidak menimbulkan kluster penularan baru," imbuhnya.(yve)

UMY pun Kini Manfaatkan GeNose

KORANBERNAS--Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) sangat menerapkan protokol kesehatan dalam melaksanakankegiatandikampus selama pandemi Covid-19. Demi untuk terus menunjang hal tersebut,kampusMudaMendunia ini membeli alat pendeteksi dini Covid-19 Genose langsung dari pengembangnya yaitu UGM, Selasa (16/3/2021). Alat Genose ini semakin menambah fasilitas protokol kesehatan di lingkungan kampus UMY.

Kepala operasional Incident Command System (ICS) UMY, Iman Permana, menjelaskan bahwa pihak kampus membeli 2 unit Genose. Alat itu dibelu dalam rangka mendeteksi virus secara dini.

"Jadi Muhammadiyah melalui Muhammadiyah Covid-19 Command Center membeli 10 unit Genose dan UMY mengambil 2 unit." ungkapnya.

Dosen dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) UMY itu juga menilai bahwa Genose adalah salah satu teknologi yang memudahkan dalam pendeteksian Covid 19 "Ke depannya kita harus sudah terbiasa dengan Covid-19, melihat perkembangan teknologi diagnostik dan screening kita harus tahu cara yang lebih mudah dan praktis dalam mendeteksi Covid-19." paparnya.

YVESTA PUTU AYU/KORANBERNAS.ID

Sejumlah mahasiswa UMY mengikuti wisuda secara luring di kampus setempat, Rabu (17/3/2021). Sebelum wisuda mereka wajib mengikuti tes antigen atau GeNose.

Dalam pelaksanaanya, Genose ini direncanakan akan digunakan dalam setiap kegiatan offline yang dilaksanakan di UMY, serta saat ada kunjungan tamu dari luar kota. Genose ini sudah resmi pertama kali digunakan oleh UMY pada acara wisuda Periode III Tahun Ajaran 2020/2021 yang dilakukan secara daring dan luring pada hari Rabu (17/3/2021) di Gedung Sportorium Kampus Terpadu UMY. Kampus memberikan kebijakan kepada para wisudawan/i untuk menyerahkan hasil Rapid Antigen atau Genose sebagai syarat pelaksanaan upacara Wisuda UMY Periode III Tahun Ajaran 2020/2021.

Rektor UMY, Gunawan Budiyanto, memberikan nasehat kepada para wisudawan/i untuk tetap semangat dan miliki tekad agar dapat beradaptasi di kehidupan baru selama pandemi Covid-19.

"Mudah-mudahan semangat dan tekad yang telah dibangun dapat menjadikan satu modal yang besar untuk kita semua untuk bisa bersama-sama melakukan adaptasi di dalam kehidupan yang baru di tengah pandemi covid-19," jelasnya.

Gunawan juga berharap para lulusan memiliki kontribusi kepada bangsa dan negara Indonesia.Mereka telah melewati masa-masa pandemi covid-19 dengan tetap sehat dan selamat dan tidak berada pada sudut kepanikan.

"Dengan keyakinan ilmu yang telah kita miliki bersama, sehingga wisudawan/i tetap dapat menyelesaikan semua tugas dan kewajiban untuk lulus dari UMY," imbuhnya.**(yve)**

Perilaku Ghosting Marak, Ini Penjelasannya

KORANBERNAS -- Psikolog UGM, Idei Khurnia Swasti menyampaikan pendapatnya tentang fenomena ghosting yang marak baru-baru ini.Menurutnya, ghosting merupakan perilaku menghindar, biasanya terjadi dalam relasi romantis seperti pacaran atau gebetan. Perilaku ghosting banyak terjadi pada masa pendekatan, pacaran, hingga menjelang perkawinan.

Idei mengatakan jarang dibahas mengenai ghosting dalam perkawinan. Sebab, komitmen perkawinan telah lebih mengikat secara hukum dan juga personal.

"Perilaku ghosting ini ditandai dengan sikap pelaku yang mulai menarik diri dari komunikasi," terangnya Selasa (23/3/2021).

Dosen Fakultas Psikologi UGM ini mencontoh sulit ditemui menjadi salah satu tanda dari ghosting. Selain itu, tidak membalas pesan, chat, atau telepon. Lalu, memiliki banyak alasan untuk menghindar jika diajak membicarakan hal yang serius.

Lantas mengapa seseorang memilih menghilang begitu saja dari kehidupan orang lain, daripada merencanakan percakapan untuk mengakhiri suatu hubungan? Idei menyampaikan lebih banyak penelitian perlu dilakukan secara khusus pada fenomena ghosting. Dari penelitian sebelumnya telah melihat berbagai jenis kepribadian keterikatan dan pilihan strategi perpisahan.

"Bisa saja orang dengan tipe kepribadian yang menghindar (avoidant personality), yaitu mereka yang ragu untuk membentuk hubungan atau sepenuhnya menghindari keterikatan dengan orang lain," urainya.

Kondisi tersebut dikatakan Idei seringkali diawali karena pengalaman penolakan orang tua. Hal itu pada akhirnya membuat individu enggan untuk menjadi sangat dekat dengan orang lain karena masalah kepercayaan dan ketergantungan. Mereka kemudian sering menggunakan metode tidak langsung untuk mengakhiri hubungan, yaitu ghosting ini.

" Akan lebih mudah dengan cara "menghilang" daripada "menghadapi langsung" karena menghadapi secara langsung akan membutuhkan upaya ekstra dalam memberikan penjelasan, yang dapat juga memunculkan serangkaian konflik-konflik baru," jelas Koordinator Bidang Psikologi Klinis, Magister Psikologi Profesi, Fakultas Psikologi UGM ini.

Ghosting juga bisa terjadi karena pelaku tidak tahu bagaimana cara mengkomunikasikan konflik dan mencari resolusi konflik. Kondisi ini biasanya diistilahkan dengan "malas membahas" atau "malas ribut". Mereka beranggapan masalah akan terselesaikan sendiri seiring dengan berjalannya waktu.

Kemungkinan lain, mereka juga merasa tidak nyaman menggantungkan permasalahan. Namun demikian, menurut mereka akan lebih mudah bersikap seperti itu daripada harus menghadapinya saat ini.

Idei menyampaikan jika alasan seseorang melakukan ghosting tidak bisa digeneralisasikan. Oleh sebab itu, disaranakan untuk tidak memberi label pelaku ghosting karena tidak benar-benar mengetahui riwayat kehidupan dan dinamika psikologis pelaku sehingga ia sampai pada perilaku tersebut.

Perilaku tersebut menimbulkan berbagai dampak seperti membuat korban merasa bingung, sakit hati, dan paranoid dikhianati ataupun menyalahkan diri sendiri. Perasaan tidak nyaman yang berkelanjutan tersebut dapat mengganggu fungsi hidup keseharian, misalnya menjadi malas makan dan beraktivitas, tidak mampu berkonsentrasi, dan penurunan performa kerja.

Lalu bagaimana jika menjadi korban ghosting? Idei menyarankan untuk jangan merendahkan diri. Berhentilah untuk mengejar orang tersebut.

"Stop chasing for people, you deserve the best. Orang yg tepat untuk Anda akan mencari Anda dan bertanggung jawab atas tindakannya," terangnya.

(yve)

Miris, Ratusan SD di Klaten Tanpa Kepsek

KORANBERNAS -- Ratusan Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Kabupaten Klaten hingga saat ini ternyata tak memiliki kepala sekolah definitif. Faktor utama yang menyebabkan kondisi tersebut dikarenakan banyaknya PNS guru yang telah pensiun.

Demi menyikapi kekosongan tersebut, seorang kepala sekolah akhirnya terpaksa mengampu di sekolah lain sambil menunggu dilantiknya kepala sekolah baru.

Kepala Dinas Pendidikan Klaten Dr Wardani Sugiyanto MPd mengatakan seorang calon kepala sekolah harus lolos uji kompetensi. Sedangkan kepala sekolah yang mengampu di sekolah lain juga harus yang mempunyai sertifikat kepala sekolah.

Ditemui usai rakor antar kepala desa di aula Kantor Camat Delanggu, Senin (22/3/2021) siang, mantan Kepala SMK Negeri 2 Klaten itu mengatakan saat ini ada sekitar 180 SD yang belum memiliki kepala sekolah definitif.

Meski demikian, Wardani menegaskan Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten telah melakukan tahapan dengan mengadakan seleksi. Pada tahap awal di bulan Desember 2020 lalu dan bulan ini akan didiklat oleh LP2KS (Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah) sebagai lembaga penjamin mutu.

Sebelumnya, Kepala Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) Dinas Pendidikan Klaten, Wasono mengatakan, calon harus mempunyai sertifikat calon kepala sekolah sebelum mengikuti uji kompetensi.

Dalam seleksi yang sudah dilakukan beberapa waktu lalu kata dia, sudah ada beberapa yang lolos substansi.

"SD ada 63 orang, SMP 28 orang dan TK ada satu orang," ujarnya.

(mgs)

GATHA GINTING /GETTY IMAGE

Siswa SD memakai masker.

Editorial

Tiga Periode

JAGAD politik Indonesia akhir-akhir ini sedang gaduh. Padahal, pemilu yang diagendakan serentak masih tahun 2024. Soal jauh atau dekat memang *debatable*. Tiga tahun dapat dikatakan masih jauh; namun tidak salah juga kalau disebut sudah dekat.

Yang jelas, kalau didekati dengan terminologi periodisasi lima tahunan, dihitung sejak bulan Oktober 2019, ketika eksekutif dan legislatif dilantik, sampai dengan Maret 2021 belumlah separo jalan. Jalannya pemerintahan baru satu setengah tahun. Artinya masih tiga setengah tahun lagi.

Partai-partai politik yang relatif sudah mapan, memiliki jaringan struktur sampai ke tingkat ranting, mungkin cenderung berpandangan perhelatan demokrasi masih jauh. Sebaliknya, partai-partai yang masih sibuk melakukan penataan organisasi, waktu tiga tahun barangkali merasa pekerjaan untuk menyambut pemilu masih banyak dan belum rampung. Waktunya tinggal sebentar lagi.

Adalah tokoh Yogya, Amien Rais, yang melemparkan bola panas ke publik. Tokoh reformasi yang sedang melahirkan partai baru bernama Partai Ummat, melalui video di media sosial mengatakan, ada agenda terselubung untuk menggolkan aturan baru "presiden tiga periode". Agenda itu bakal menjadi salah satu isu terpenting yang akan dibahas dalam Sidang (Istimewa) MPR dalam waktu dekat. Para politisipun lalu geger. Saling bersilang pendapat soal ini. Wacana ini mulai mengemuka sejak 13 Maret yang lalu.

Dua hari kemudian, Presiden Jokowi langsung memberikan klarifikasi, bahwa tidak ada niat sedikitpun untuk maju kembali dalam kontestasi pilpres pada 2024 yang akan datang.

Sederhana sebenarnya. Tak ada asap bila tidak ada api. Kalau tokoh sekaliber Amien Rais melempar bola panas itu, tentu memiliki argumen. Apalagi, mantan Ketua MPR itu juga seorang akademisi yang secara logika sulit dipercaya asal *ngomong* tanpa data. Dari mana sumber informasi Amien, adalah hal lain yang masih harus ditelusur kesahihannya.

Masa jabatan presiden dan wakil presiden, memang sudah dibatasi oleh konstitusi dasar kita melalui amandemen pertama pada Sidang Umum MPR tahun 1999.

Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

Jalan untuk memuluskan syahwat kekuasaan tiga periode, memang hanya dapat dilakukan melalui amandemen UUD 1945.

Siapa yang sebenarnya "ingin" tiga periode? Benarkah ramalan Amien Rais? Sejarah yang akan membuktikannya. **

Disain Pemilu Serentak

Oleh:
Dr. Despan Heryansyah, SHI., SH., MH.

DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah, saat ini tengah membahas Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum Serentak untuk tahun 2024 mendatang. Semenjak tahun 2014 lalu, pemerintah telah merencanakan penyelenggaraan Pemilu Serentak Nasional, baik di tingkat pusat maupun daerah. Setidaknya, pilihan kebijakan ini dasarkan pada realitas anggaran pemilu yang cukup besar, baik sebagai logistik pemilu maupun gaji penyelenggara dan pengawas pemilu. Selain itu, pemilu tingkat pusat dan daerah, yang diselenggarakan setiap tahun, menguras banyak energi pemerintah, masyarakat, dan penyelenggara sendiri. Belum lagi potensi konflik yang cukup mengkhawatirkan, karena masih kuatnya politik identitas dalam bentuk primordialitas dan konservativisme setiap kali penyelenggaraan pemilu.

Tentu ada cukup banyakisusubstantifyang patut diperdebatkan, karena memang pemilu Indonesia tengah dalam perjalanan menemukan jati dirinya yang melindungi demokrasi sekaligus mengakomodir nilai-nilai keindonesiaan. Misalnya perdebatan klasik dan panjang mengenai presidensial *threshold*, atau parlementer *threshold* dalam konteks penyederhanaan partai politik, calon perseorangan baik presiden maupun kepala daerah, calon tunggal presiden dan kepala daerah. Di samping itu, hal substantif lain yang cukup krusial adalah bagaimana desain Pemilu Serentak Nasional yang akan dipilih? Topik ini tidak saja penting, namun teramat krusial karena menentukan keberhasilan Pemilu Serentak pada masa mendatang

Pilihan Model

Pertama, pilihan atas pemilu yang benar-benar serentak dalam artian bersamaan pada tingkat pusat dan daerah, baik eksekutif maupun legislatif yaitu: presiden, gubernur, bupati/walikota, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, sekalipun jauh lebih menghemat dana dan mempersingkat waktu, namun justeru meninggalkan banyak masalah, dari aspek teknis dan substantif. Pada pemilu serentak 2019 lalu, yang hanya memilih DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan presiden, menyisakan persoalan, yang menurut data KPU, 894 petugas pemilu meninggal dunia. Dapat dibayangkan kondisi yang akan terjadi apabila ditambah pula dengan pemilihan gubernur, bupati, dan wakilota. Dari aspek substantif, kertas suara yang begitu banyak tidak saja membingungkan pemilih, namun juga merugikan calon yang bisa saja kehilangan suara, karena nama dan gambarnya tidak begitu tampak. Oleh karena itu, risiko yang dapat diperkirakan cukup mengkhawatirkan atas pilihan model ini.

Kedua, pilihan berikutnya adalah membagi pemilu menjadi dua yaitu pemilihan legislatif pada satu waktu dan pemilihan eksekutif pada waktu yang lain. DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota akan dipilih pada satu waktu secara bersamaan. Kemudian pada tahun berikutnya akan memilih presiden, gubernur, bupati/walikota. Pilihan ini cukup rasional, bukan saja karena akan mengurangi risiko kesehatan yang selama ini dikhawatirkan, tapi juga diharapkan dapat meminimalisir kesejangan politik antara presiden dengan kepala daerah seperti yang selama ini terjadi. Presiden dan kepala daerah yang dipilih secara bersamaan memungkinkan konstituen untuk memilih dari partai yang sama. Pada sisi yang lain mengharuskan partai politik untuk mendelegasikan kader-kader terbaiknya baik pada level nasional maupun lokal.

Ketiga, pilihan ini adalah membagi pemilu menjadi dua atau tiga tingkatan, yaitu tingkat pusat dan tingkat daerah. Tingkat pusat adalah pemilihan presiden dan DPR RI serta DPD dalam waktu bersamaan. Kemudian pada tahun berikutnya pemilu tingkat daerah yaitu kepala daerah dan DPRD, yang dapat dilakukan bersamaan atau dipecah lagi menjadi dua klaster yaknipemilihangubernur dan DPRD Provinsi lalu pemilihan bupati/walikota dan DPRD Kabupaten/Walikota. Membagi pemilu menjadi tingkat nasional dan lokal ini mungkin akan lebih baik dibandingkan dengan pilihan model yang lain. Dari aspek substantif, masyarakat juga benar-benar memiliki waktu untuk mencari dan menggali sejauh mana seorang calon meyakinkan untuk dipilih menjadi wakil di legislatif maupun eksekutif.

Sayangnya, RUU yang tengah hangat menjadi pembicaraan ini harus tertunda, karena fraksi di DPR berbeda pendapat. Sebagian ingin meneruskan pembahasan, namun sebagian yang lain memilih menunda agar pemerintah dapat fokus pada penanganan pandemi Covid-19. Argumentasi ini cukup rasional, namun rasanya agak berlebihan karena penyelenggaraan pemilu adalah masalah substansial yang juga harus dilindungi. Namun demikian, poin yang harus kita kawal bersama adalah, kran partisipasi masyarakat harus dibuka selebar-lebarnya. Jangan sampaisuatu RUU muncul tiba-tiba dan langsung disahkan sebagaimana yang belakangan ini terjadi. Dari aspek moralitas dan filosofis, partisipasi rakyat adalah legitimasi keabsahan suatu undang-undang, sekalipun kita menganut demokrasi perwakilan.

***

Dr. Despan Heryansyah, SHI., SH., MH.
Peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) FH UII Yogyakarta

Mati Rasa Dunia Perpolitikan, Benarkah?

Oleh: Sudjito Atmoredjo

ISU kudeta di tubuh Partai Demokrat mencuat. Presiden, mantan presiden, menteri, mantan menteri dan sejumlah elit politik terlibat di dalamnya. Melihat karut-marut dunia perpolitikan itu, Abu Nawas cuma bergumam "*Kok tidak malu ya. Apakah mereka sudah mati rasa*?"

Gumaman itu terkesan sarkastis. Memunculkan aroma tak sedap. Dapat diduga, Abu Nawas kecewa terhadap situasi negara. Utamanya perilaku elit-elit politik. Dalam alur kewarasan nalarnya, mestinya, situasi apapun yang melanda kehidupan bernegara, didialogkan. Sejawat, para sesepuh, para pakar, semuanya didengar pendapatnya. Merekalah sosok begawan. *Wening pikiré. Ombo wawasané*. Pada merekalah obat penawar penyakit kebangsaan berada. Asupan gizi spiritual diperlukan demi terjaganya stabilitas temperatur batin.

Dalam perspektif filosofis dan konstitutif, Indonesia adalah negara hukum. Bukan negara kekuasaan. Bukan pula negara kekuatan. Begitulah kesepakatan bangsa yang telah terpateri dalam UUD 1945.

Benang merah dari penalaran di atas, bahwa kudeta partai politik, sebagai bentuk main kuasa ala penjajah, mesti ditabukan. Bukankah martabat semua partai politik sama?!. Tidak boleh ada diskriminasi maupun penindasan. Penjajahan maupun kudeta adalah perilaku zalim. Bertentangan dengan nilai-nilai keadaban, persatuan, dan keadilan. Sebaliknya, musyawarah-dialogis, adalah wujud nyata demokrasi. Hak semua warga negara, mesti dihargai eksistensi dan fungsinya. Interaksi saling hormat-menghormati antara semua komponen bangsa, mesti terjalin. Segalanya, demi kehidupan bernegara yang damai, maju, dan bermartabat.

Bila di antara komponen bangsa, lebih-lebih penguasa, ada yang lupa komitmen kebangsaan, kiranya patut diingatkan. Setelah ingat, mestinya, segera bergegas kembali ke ranah kebenaran. Jangan nekat. Jangan terus sesat. Jangan berkhianat. Ini persoalan mendasar. Persoalan akhlak. Persoalan rasa. Perlu pembenahan serius.

Penyelenggara negara maupun warga negara, dalam berpolitik tidak boleh mati rasa. Unsur rasa, merupakan salah satu unsur kemanusiaan penting. Keberadaan dan fungsinya amat signifikan. Hanya dengan rasa, negara hukum ini akan dapat melahirkan keadilan. Terbebaskan dari kezaliman.

Keadilan, bukan sekadar urusan kekuasaaan, kekuatan, dan rasio belaka. Keadilan sarat dengan unsur rasa. Ambil contoh: dalam lingkup keluarga, orang tua dipandang bijak dan mampu berbuat adil terhadap anak-anaknya, ketika apa yang diberikannya bukan sekadar materi, melainkan mencakup perhatian dan kasih-sayang. Kasih sayang itu bagian dari unsur rasa.

Dalam lingkup bernegara, unsur pemerintah, kiranya sepadan dengan kedudukan orang tua dalam keluarga. Dalam persoalan serumit apapun, unsur materi, kepedulian, dan kasih sayang mesti menjadi perhatian bersama. Jangan sok kuasa. Jangan diskriminasi. Jangan *bang cindé bang siladan*. Partai politik tertentu digendong dengan kain sutera, sementara partai politik lain digendong dengan kain kasar. Bahkan dizalimi.

Bila di antara partai politik ada yang dianaktirikan, hal demikian isyarat ada sesuatu masalah serius. Gejolak atau perlawanan pasti muncul. Semisal cacing, bila dinjak pasti bergeliat. Perlawanan demikian, tidak muncul tiba-tiba. Segalanya ada sebab-musababnya. Artinya, instropeksi pada pemerintah selaku pembina semua partai politik, menjadi penting. Sungguh malu, bila pemerintah diprotes berbagai pihak karena dipandang bersikap diskriminatif. Alangkah naif, bila kritik, saran, masukan hingga protes, direspons dengan pembungkaman, penangkapan, dan tindak kekerasan. Bila itu terjadi, sungguh hal demikian tanda-tanda nyata mati rasa.

Negara hukum sebagai jagat ketertiban, senantiasa menggambarkan kehidupan bersama atau potret jaringan kompleks antarberbagai komunitas di dalamnya (Rahardjo, 2000). Semua pihak hanya bisa hidup nyaman bila mampu menerima kehadiran komunitas lain. Kemajemukan komunitas merupakan *sunatullah*, sekaligus basis ketertiban. Ketertiban hukum dan keadilan, hanya ada, bila semua pihak mau menerima kemajemukan dengan *lila legawa*. Demikian juga, ketertiban politik, ekonomi, sosial-budaya, dan lainnya, senantiasa berlayar dan beroperasi di lautan kemajemukan komunitas yang luas. Kadang tenang, kadang oleng ketika diterpa badai. Sang nakoda bertanggung jawab terhadap keselamatan seluruh penumpang.

Sejarah panjang kehidupan umat manusia, para penguasa, dan negara-negara terdahulu, menunjukkan bahwa kekuatan fisik, dorongan nafsu duniawi, kekuasaan formal, cenderung merebut hegemoni kehidupan. Tetapi perlu disadari, bahwa banyak bukti empiris, kegagalan, *suul khatimah*, senantiasa merupakan bagian tak terpisahkan. Tinggallah puing-puing kenangan penguasa-penguasa zalim, terpahat di dinding peradaban bangsa.

Aliran positivisme, bergandengan tangan dengan kapitalisme, tak henti-hentinya bersuara keras, bahwa: "Hukum agama, hukum adat, tradisi, budaya, hanya boleh hidup sepanjang diakui dan diizinkan berlaku oleh penguasa negara". Pernyataan demikian, sarat dengan kecongkakan. Padahal, senyatanya, berlakunya ungkapan demikian tidak serta-merta menumbuhkan kekuatan hukum absolut (*legitimacy*). Dipastikan ada dan terjadi, adu kekuatan (*power relations*), antara kekuatan komunitas nonformal versus kekuatan negara.

Selama ini, komunitas negara seakan selalu menjadi pemenangnya. Rakyat tertentu dihadapi sebagai lawan. "*Negara tidak boleh kalah*", katanya. Dengan dukungan partai koalisi, oligarki, dan aparat keamanan, menjadikan konstruksi negara sedemikian kuat. Kedaulatan hukum dan politik bisa dikontruksi sedemikian rupa, sejak pembuatan, pelaksanaan, hingga penegakannya. Muncul pertanyaan, inikah negara hukum substantif yang diinginkan *founding fathers*? Akankah hukum di negeri ini dibiarkan tertatih-tatih mengikuti kekuasaan?

Fukuyama (1999) berusaha untuk menyelami perihal jagat ketertiban, yang dinilainya cenderung sarat penindasan. Dibukalah tabir ketertiban (*order*) maupun ketidaktertiban (*disorder*). Bertolak dari sumber hukum negara, nyatalah, sumber-sumber hukum itu bermacam-macam. Pada negara modern, paling dominan adalah berupa kekuasaan sentralistis. Dalam pada itu, sumber-sumber hukum lainnya, terpinggirkan.

Kenyataan tersebut dilukiskan dengan kalimat, "*No one would deny the social order is often created hierarchically. But it is useful to see that order can emerge from a spectrum of sources that extended from hierarchical and centralized types of authority, to the completely decentralized and spontaneous interaction of individuals*."

Dominannya satu sumber hukum saja, yakni kekuasaan sentralistis, menunjukkan munculnya kecenderungan bahwa kebenaran, kejujuran, kepedulian terhadap sesama, dan sekaligus kehidupan berbangsa, berlangsung tanpa rasa, tanpa malu, tanpa empati dan tanpa simpati. Situasi demikian, berimplikasi luas. Misal, dalam hal keadilan. Seolah tiada tempat pencarian keadilan kecuali pengadilan negara. Padahal, setiap warga negara butuh keadilan. Akses terhadap keadilan (*access to justice*) mestinya terbuka lebar. Kemajemukan komunitas, mestinya menjadi argumen kuat untuk penyediaan berbagai macam lembaga/ruang pengadilan (*justice in many rooms*).

Kembali ke persoalan kudeta Partai Demokrat. Bila rasa keadilan telah dinihilkan, serta merta persoalan diadili di pengadilan negara, mudah diprediksi, siapa dimenangkan dan siapa terkalahkan. Tragedi mati rasa bisa berlanjut hingga ruang pengadilan, dan meruntuhkan hati nurani hakim. Akankah demikian? Entahlah. Kebaikan kehidupan bersama selalu menjadi dambaan. *Wallahu'alam*.***

Prof. Dr. Sudjito Atmoredjo, S.H., M.Si.
Guru besar ilmu hukum UGM

KORAN BERNAS
www.koranbernas.id
JUJUR - KONSTRUKTIF - BERETIKA

Komisaris Utama: Drs. Yos Suharto, M.Si. **Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Putut Wiryawan. **Wakil Pemimpin Umum/Wakil Pemimpin Redaksi:** Heru Catur Nugroho. **Redaktur Pelaksana:** Yvesta Putu Ayu Palupi **Sidang Redaksi:** Putut Wiryawan, Heru Catur Nugroho, Yvesta Putu Ayu Palupi, Warjono, Sholihul Hadi, Rosihan Anwar, Arie Giyarto, Sukendar, Daniel Tatag, Muhammad Zukhronnee Muslim, Leo Setiawan Prasojo, Rahadian Prasetyo, Nila Hastuti **(Sleman)**, Sariyati Wijaya **(Bantul)**, Sutaryono **(Gunungkidul)**, Sri Widodo **(Kulonprogo)**, Masal Gurusinga **(Klaten)**, V. Kirjito **(Muntilan)**, Bekti Maharani **(Semarang)**, Nanang W Hartono **(Kebumen)**, Endri Yarsana **(Temanggung)**, Wahyu Asmani **(Purworejo)**, Prasetiyo **(Purbalingga)**. **Disainer:** Muhammad Zukhronnee Muslim, Lilik Sumantoro. **Divisi Iklan:** Christina Hesti Apri Wulandani (Kepala).

Alamat Redaksi: Jl. Nitiprayan II, Gg. Antasena No.102A, Jomegatan, Ngestiharjo, Kec. Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55182. Telepon (0274) 4293731
Alamat Tata Usaha: Jl. Gampingan Baru No. 31, RT-042/RW-009, Pakuncen, Wirobrajan, Yogyakarta. Telp. +6274-583831.
Koran Bernas *online* dan cetak diterbitkan oleh PT Rajawali Siaga, Jl. Gampingan Baru No. 31, RT-042/RW-009, Pakuncen, Wirobrajan, Yogyakarta. Telp. +6274-583831. NPWP: 31.692.786.2-541.000
Alamat web: https://koranbernas.id **Tarif Iklan Cetak:** Display warna Rp 18.000,-/mmk; hitam putih Rp 9.000,-/mmk. Kolom: Rp 6.000,-/mmk (minimal 1 kolom x 30 mm, maksimal 1 x 100 mm). Iklan baris Rp 6.000,-/baris. Iklan keluarga/duka cita: Rp 5.000,-/mmk. Advertorial warna Rp 14.000,-/mmk, hitam putih Rp. 7.000,-/mmk (minimal ¼ halaman). Semua harga ditambah PPN 10 %.
Tarif Iklan Online:
Posisi atas: Rp. 220.000,-/3 hari, Rp. 385.000,-/7 hari, Rp. 660.000,-/14 hari, Rp. 1.100.000,-/30 hari.
Posisi di bawah berita:
Rp. 198.000,-/3 hari, Rp. 352.000,-/7 hari, Rp. 572.000,-/14 hari, Rp. 990.000,-/30 hari.
Posisi samping kanan:
Rp. 165.000,-/3 hari, Rp. 275.000,-/7 hari, Rp. 495.000,-/14 hari, Rp. 825.000,-/30 hari.
Posisi bawah: Rp. 110.000,-/3 hari, Rp. 192.500,-/7 hari, Rp. 330.000,-/14 hari, Rp. 550.000,-/30 hari. Semua harga sudah termasuk PPN 10 %.
Harga iklan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Bank: Bank Mandiri A/C: 900-003-7272-367
Penerbit: PT Rajawali Siaga

Permaisuri Raja Yogyakarta Tertarik Mobil Maung

KORANBERNAS.ID, GUNUNGKIDUL -- Mobil operasional Bupati Gunungkidul Sunaryanta jenis Maung 4x4 buatan Pindad Bandung, menarik permaisuri Keraton Yogyakarta, GKR Hemas. Maung yang dalam bahasa Indonesia berarti macan merupakan kendaraan taktis yang kini menjadi mobil dinas keseharian Sunaryanta.

Dalam kunjungannya ke Kabupaten Gunungkidul, secara khusus GKR Hemas menghampiri mobil seharga Rp 600 juta yang dibeli dengan uang pribadi Sunaryanta saat kebetulan diparkir di halaman Bangsal Sewokoprojo.

Usai acara, GKR Hemas yang didampingi Sunaryanta, tidak langsung menuju mobilnya untuk kembali ke Jogja, tetapi justru menghampiri mobil satu-satunya di Gunungkidul, bahkan di DIY ini.

Istri dari Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X ini tidak hanya melihat bagian luarnya, namun sengaja membuka pintu mobil dan melihat bagian dalamnya. Sementara Bupati Gunungkidul Sunaryanta, menjawab beberapa pertanyaan terkait mobil semi militer ini.

"Terus terang saya tertarik dengan mobil ini. Karena dulu bapak saya 10 tahun bekerja di Pindad. Ternyata ini salah satu karya anak bangsa di Pindad," kata GKR Hemas pada wartawan usai menghadiri serah terima Ketua PKK Gunungkidul.

Hemas mengaku sangat bangga dengan prestasi Pindad, di antaranya mampu membuat mobil seperti Maung. Anggota DPD RI ini tidak hanya sekadar melihat-lihat keberadaan mobil yang tampak garang ini, tetapi juga menyempatkan foto dengan Sunaryanta, diikuti beberapa ibu-ibu yang lain.

Sunaryanta mengaku tidak menduga GKR Hemas tertarik dengan mobilnya. "Kami juga ikut bangga karena telah menghargai karya anak bangsa yang memang luar biasa ini," kata Sunaryanta.

SUTARYONO/KORANBERNAS
GKR Hemas mengamati mobil Maung buatan Pindad milik Bupati Gunungkidul Sunaryanta.

SUTARYONO/KORANBERNAS
Serah terima jabatan Ketua PKK Gunungkidul.

Anggaran PKK

Sebelumnya, Bupati Gunungkidul, Sunaryanta mengaku sedih dan tidak pernah menduga, anggaran untuk berbagai kegiatan PKK di Gunungkidul hanya Rp 30 juta setiap tahunnya.

"Apa ini benar ibu-ibu. *Masak* anggaran PKK hanya Rp 30 juta," tanya Sunaryanta. Spontan puluhan ibu-ibu yang merupakan pengurus PKK kabupaten langsung menjawab.

"Benar Pak," kata mereka.

Tampaknya Sunaryanta masih penasaran, dan kembali bertanya.

"Anggaran Rp 30 juta itu setiap bulan, atau satu tahun?"

Ibu-ibu kembali menjawab kompak.

"Setahun, Pak."

Munculnya permasalahan minimnya anggaran PKK ini justru disampaikan Ketua Tim Penggerak PKK Provindi DIY, GKR Hemas ketika memberikan sambutan pada serah terima jabatan Ketua PKK Kabupaten Gunungkidul masa bakti tahun 2021-2026, di Bangsal Sewokoprojo Wonosari, Rabu (3/3/2021).

Menurut GKR Hemas, anggaran PKK di Gunungkidul setiap tahunnya hanya Rp 30 juta. "Makanya kami mohon pada bapak bupati yang baru untuk bisa menambah anggaran PKK ini. Paling tidak bisa sama dengan kabupaten lain di DIY," pintanya.

Diakui, di tengah anggaran yang sangat terbatas, namun prestasi PKK di Gunungkidul sangat membanggakan, bahkan berulang kali meraih juara. "Kami percaya, jika anggaran nanti di tambah, prestasinya akan jauh lebih baik," tambahnya.

Secara terpisah Sunaryanta kepada wartawan juga kaget karena anggaran PKK hanya kecil. "Tentu kami nanti akan menambah. Tetapi berapa tambahnya, coba kita lihat lagi anggarannya seperti apa," ucapnya.

Serah terima jabatan dari Ketua Tim Penggerak lama, Ny Immawan Wahyudi pada pejabat baru, Ny Diah Sunaryanta. Acara ini ditandai dengan penandatanganan berita acara disaksikan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DIY, GKR Hemas dan Bupati Gunungkidul, Sunaryanta.

(ryo)

Kerja Keras PKB Gunungkidul Berbuah Manis

KORANBERNAS.ID, GUNUNGKIDUL -- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Gunungkidul yang dalam pilkada tahun 2020 mengusung pasangan Bupati dan Wakil Bupati Sunaryanta-Heri Susanto, berbuah manis kepada Sutiyo. Dia terpilih kembali menjadi Ketua DPC PKB Gunungkidul masa bakti 2021-2026.

Dalam Musyawarah Cabang (Muscab) yang berlangsung di Wonosari, Sabtu (6/3/2021), Sutiyo didampingi Wakil Ketua I Suwignyo, Wakil Ketua II Hartini dan Wakil Ketua III Yulinda. Sekretaris dipercayakan kepada Ngatiminarto, sedang Bendahara Agus Wahyuditomo.

Sutiyo mengaku, kepercayaan para kader PKB pada dirinya, menjadi tantangan berat. "Sekarang ini PKB hanya mempunyai empat wakil rakyat di DPRD. Pada pemilihan legislatif mendatang, jumlah perolehan kursi harus bertambah. Minimal 9 kursi," katanya.

Meski begitu, pihaknya optimistis target itu tercapai. Selain mendapat dukungan penuh kader, termasuk warga NU, juga peran aktif pasangan bupati dan wakil bupati dipastikan akan mampu mendongkrak perolehan suara pada pemilu legislatif.

Sutiyo mengaku akan membangun gedung. PKB, katanya, selama ini memang belum punya gedung sendiri. "Tanah sudah ada. Hanya saja untuk pembangunan gedungnya, dananya belum ada. Semoga Pak Bupati bisa mengusahakan," pintanya.

Bupati Gunungkidul Sunaryanta mengapresiasi kerja keras PKB termasuk warga NU sehingga dirinya terpilih menjadi orang pertama di Gunungkidul. "Mari kita berjuang bersama, agar amanah masyarakat ini bisa kami laksanakan dengan sebaik-baiknya," katanya.

(ryo)

SUTARYONO/KORANBERNAS
Suasana muscab PKB Gunungkidul.

Selama Jadi Bupati tidak Ambil Gaji

KORANBERNAS.ID, GUNUNGKIDUL -- Tak hanya punya mobil Maung 4x4 produk Pindad seharga Rp 600 juta yang dibeli dengan uang pribadi, Bupati Gunungkidul Sunaryanta juga tidak akan mengambil gaji. Bahkan gaji yang tidak diambil ini tidak hanya satu atau dua bulan, namun selama menjadi bupati.

"Selama menjadi bupati. Gaji tidak akan saya ambil. Nanti akan kita kembalikan pada rakyat," kata Sunaryanta, Bupati Gunungkidul kepada wartawan seusai menghadiri acara serah terima jabatan sebagai bupati, di gedung DPRD, Senin (1/3/2021).

SUTARYONO/KORANBERNAS
Bupati Gunungkidul Sunaryanta.

Dalam sambutan pada acara serahterima jabatan, Sunaryanta menegaskan dalam rangka menjalankan amanat kepemimpinan sekaligus pengabdian kepada masyarakat Gunungkidul, pihaknya telah menetapkan visi yaitu *Mewujudkan Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Gunungkidul yang Bermartabat*.

Sebagai pijakan arah tujuan pembangunan di Gunungkidul tahun 2021-2024, visi tersebut akan diwujudkan melalui dua hal yakni mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan dinamis serta demokratis, dan meningkatkan pembangunan manusia dan keunggulan potensi daerah.

"Untuk mencapai hal tersebut, kami telah menentukan tujuh strategi atau yang kami sebut *Sapta Karya*," katanya. *Sapta Karya* itu meliputi Meningkatkan persatuan dan kesatuan. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kemudian, membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Memanfaatkan sumber daya alam secara optimal demi kepentingan masyarakat yang lebih besar.

Penguatan ekonomi kerakyatan, pariwisata dan investasi. Pengembangan seni budaya dalam rangka mendukung pembangunan pariwisata dan yang ketujuh adalah membangunan kawasan yang terintegrasi.

"Motto pembangunan yang kami canangkan adalah, Gunungkidul Membangun, Rakyat Makmur," tambah Sunaryanta.

Terpisah, mantan Wakil Bupati Gunungkidul, Immawan Wahyudi mengapresiasi *Sapta Karya* yang disampaikan Sunaryanta. Menurutnya, apa yang tertuang di situ masih sejalan dengan program kerja yang sudah dijalankan dirinya bersama Badingah selama memimpin Gunungkidul.

Diaberharap Sunaryanta dan Heri Susanto benar-benar mewujudkan *Sapta Karya* demi pembangunan di Gunungkidul. Terutama yang paling penting adalah kesejahteraan warga.

Ketua DPRD Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih juga mengharapkan visi-misi itu terealisasi. "Kami harapkan kerja sama yang lebih sinergi dalam menjalankan pemerintahan di Gunungkidul," katanya. **(ryo)**

3.000 Atlet Gratis Kuliah Hingga Sarjana

SUTARYONO/KORANBERNAS
Rapat kerja KONI Gunungkidul.

KORANBERNAS.ID, GUNUNGKIDUL -- Dalam upaya meningkatkan prestasi olahraga, Bupati Gunungkidul Sunaryanta akan memberikan beasiswa bagi 3.000 atlet berprestasi untuk menempuh jenjang pendidikan S1.

"Bagi atlet yang berprestasi, kami akan menggratiskan kuliah hingga sarjana. Saya sudah melakukan pembicaraan dengan tiga perguruan tinggi di Bekasi. Ada alokasi sebanyak 3.000 atlet yang berprestasi untuk kuliah gratis," kata Sunaryanta pada Rapat Kerja KONI Gunungkidul di Wonosari, Sabtu (6/3/2021).

Kuliah gratis hingga jenjang sarjana ini merupakan salah satu bentuk penghargaan Pemkab Gunungkidul dalam upaya meningkatkan prestasi olahraga.

Diakui, Gunungkidul selama ini mempunyai banyak atlet berbagai cabang yang berprestasi. "Ini semua juga berkat kerja keras dan peran aktif para pengurus KONI," tambahnya.

Sunaryanta dalam kesempatan ini juga akan berusaha maksimal agar Gunungkidul dalam waktu yang tidak terlalu lama, mempunyai gedung olahraga atau *sport center*.

"Saya sudah lobi dengan berbagai pihak di Jakarta, dalam upaya mempercepat terwujudnya *sport center* yang selama ini banyak didambakan masyarakat Gunungkidul," katanya.

Salah seorang pengurus KONI Gunungkidul, Jarot Budi Santoso, mengaku keterlibatan pemkab dalam kemajuan berbagai cabang olahraga sangat diperlukan.

"Sekarang ini kita sedang menyatukan tekat agar olahraga di Gunungkidul jauh lebih baik," kata dia. **(ryo)**

Industri Furniture Kini Jadi Andalan

KORANBERNAS.ID, BANTUL -- Pandemi Covid-19 mempengaruhi perekonomian nasional. Ekonomi melambat. Daya serap tenaga kerja sektor industri berkurang. Pengangguran meningkat. Sebagai upaya memulihkan ekonomi, industri furniture merupakan salah satu bidang yang bisa diandalkan.

"Jika sebelumnya pertanian mendominasi perekonomian di Bantul, beberapa tahun terakhir industri furniture melampaui hal tersebut," papar Abdul Halim Muslih, Bupati Bantul, saat menghadiri Diklat three-in-one sektor furniture dan kerajinan, Senin (15/3/2021) di Kelurahan Gadingsar Kapanewon Sanden.

Baginya, diklat ini tepat dilaksanakan saat menyongsong kebangkitan kembali industri mebel dan *craft* usai terdampak pandemi setahun ini. "Kita harapkan industri yang seret dapat kembali bergeliat," harapnya.

Untuk mendorong pertumbuhan industri nasional, terdapat tiga pilar utama yang harus menjadi perhatian yaitu investasi, teknologi dan Sumber Daya Manusia (SDM). Dari tiga pilar tersebut, potensi besar bagi Indonesia adalah ketersediaan SDM yang melimpah.

Ketua Asosiasi Industri Permebelan dan kerajinan Indonesia (Asmindo), Timbul Raharjo, menambahkan guna membekali SDM furnitur, mebel dan kerajinan, pihaknya bersama Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Furnicraft serta Balai Diklat Industri DIY memberikan pelatihan gratis bagi SDM furniture dan *craft*.

"Program ini akan menjaring 2.000 SDM di seluruh Indonesia agar memiliki kompetensi *mumpuni*, bersertifikasi dan mampu bekerja pada semua industri jaringan Asmindo, maupun di luar," terangnya.

Direktur LSP Furnicraft, Susilo, menyatakan pihaknya menargetkan diklat dan sertifikasi sebanyak 2.000-an peserta pelaku Industri furniture dan kerajinan anggota Asmindo yang tersebar di seluruh Indonesia.

Hingga Juli 2021 sudah tejadwal pada beberapa wilayah di Indonesia di antaranya Yogyakarta meliputi empat kabupaten satu kota, Klaten, Solo, Temanggung, Jombang, Jepara, Blora, Rembang, Palembang dan Bali.

Peserta diklat gelombang satu 45 orang, meliputi perancangan *furniture design*, mengerjakan pembahanan (*Rough Mill*), tukang kayu konstruksi dasar, mengerjakan konstruksi (*Machining*), perakitan (*Asembling*), *finishing* hingga merancang displai pameran.

Kepala Balai Diklat DIY, Tevi Dwi Kurniawati, menambahkan SDM yang kompeten dan profesional merupakan kunci keberhasilan dari sebuah organisasi.

Hal ini sesuai arahan presiden, pembangunan nasional saat ini difokuskan SDM berkualitas sehingga perlu dilakukan berbagai program pendidikan dan pelatihan vokasi secara masif.

"Pelatihan Three-in-One Berbasis Kompetensi sebagai wujud nyata peran pemerintah menekan angka pengangguran dan meningkatkan kompetensi SDM agar siap bersaing di era persaingan global," kata dia. **(rne)**

Pemkab Ingin Ide dan Masukan Konstruktif

KORANBERNAS.ID, SLEMAN--Pemerintah Kabupaten Sleman sangat membutuhkan ide, gagasan, serta berbagai masukan yang konstruktif, guna merumuskan dan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) lima tahun ke depan. Gagasan, ide, serta masukan-masukan dari masyarakat, diharapkan akan lebih memperkaya dan menyempurnakan perencanaan program pembangunan di Sleman.

Upaya untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam RPJMD ini, diantaranya dilakukan dengan menggelar Forum Konsultasi Publik penyusunan RPJMSD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026. Kegiatan digelar di Ruang Pangripta Bappeda Sleman, Jumat (19/3/2021). Acara Forum Konsultasi Publik, dibuka oleh Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo.

Dalam sambutannya, Kustini mengatakan, forum tersebut merupakan wadah untuk menampung ide, gagasan, serta berbagai masukan yang konstruktif dari masyarakat, guna perumusan dan penyusunan RPJMD Kabupaten Sleman untuk lima tahun ke depan. Forum Konsultasi Publik ini juga diisi dengan paparan dari Kepala Bidang Perencanaan Bappeda DIY, Danang Setiadi, kemudian dilanjutkan dengan paparan oleh Kepala Bappeda Sleman, Kunto Riyadi.

ISTIMEWA

Kustini Sri Purnomo membuka Forum Konsultasi Publik penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman tahun 2021-2026, Jumat (19/3/2021).

Dalam sambutannya, Kustini mengajak semua pihak untuk menyatukan tekad dan langkah demi bersama-sama mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026, yaitu "Terwujudnya Masyarakat Sleman Yang Cerdas, Sejahtera, Berdaya Saing, Menghargai Perbedaan dan Memilki Jiwa Gotong Royong".

Untuk itu diperlukan sinergi, kolaborasi, diskusi, serta proses panjang lainnya yang harus dilalui, termasuk melalui Konsultasi Publik penyusunan RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 ini.

"Sudah barang tentu untuk mewujudkan hal tersebut bukanlah pekerjaan mudah. Maka perlu kerja sama dari seluruh pihak," kata Kustini.

Kustini juga berharap seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemkab Sleman mampu menjabarkan visi dan misi Kabupaten Sleman dengan sebaik-baiknya. Perangkat daerah, harus mampu menyusun sasaran perangkat daerah, program prioritas beserta indikator kinerja yang terukur dan tersedia data yang relevan sekaligus terkait langsung dengan pencapaian visi misi.

"Jangan sampai program dan kegiatan yang direncanakan oleh perangkat daerah tidak berorientasi pada manfaat untuk rakyat dan tidak berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan," tegasnya.

(ila)

Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2020 Segera Dibahas

KORANBERNAS.ID, SLEMAN-- Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo didampingi Wakil Bupati Danang Maharsa, menyerahkan Nota Keuangan Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2020 pada acara Sidang Paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Sleman, Senin (22/3/2021).

Kustini menjelaskan, bahwa nota keuangan ini merupakan wujud pertanggungjawaban Bupati dalam pelaksanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. Nota keuangan ini disusun setelah selesainya pemeriksaan laporan keuangan tahun anggaran 2020 oleh BPK-RI.

"Syukur alhamdulillah BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengeculian (WTP) terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2020. Ini berkat dukungan dan komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif dalam perencanaan dan penetapan secara tepat waktu," kata Kustini.

Diungkapkan Kustini, target pendapatan Tahun Anggaran 2020 setelah perubahan sebesar Rp 2.538.365.662.110 dapat direalisasikan sebesar Rp 2.541.050.870.612 atau 100,11%. Sementara untuk anggaran belanja dan transfer setelah perubahan sebesar Rp 2.908.092.312.851 dengan realisasi sebesar Rp2.532.169.209.185 atau 87,07%.

ISTIMEWA

Kustini Sri Purnono menyerahkan Nota Keuangan Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2020 pada acara sidang paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Sleman, Senin (22/3/2021).

"Saya berharap rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ini dapat segera dibahas, disempurnakan dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020," tambah Kustini.

Ketua DPRD Kabupaten Sleman, Haris Sugiharta mengatakan, bahwa penyampaian Nota Keuangan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020, telah diatur di dalam Pasal 194 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 298 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD memuat laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan, laporan kinerja yang telah diperiksa BPK dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

"Hal ini mempunyai makna bahwa laporan dari BPK tersebut merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dalam nota keuangan raperda dimaksud," jelas Haris.

Haris menambahkan bahwa laporan hasil pemeriksaan dari BPK telah diterima DPRD yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020, neraca komparatif, laporan arus kas, laporan surplus defisit dan catatan atas Laporan Keuangan, pada tanggal 10 Maret 2021.

(ila)

Berbagi Nasi Kotak Saat Jumat Berkah

KORANBERNAS.ID, BANTUL -- Sejak pagi perempuan-perempuan itu terlihat sibuk memasak nasi, sayur dan aneka lauk di maskas DPC Gerakan Pemuda Marhaen (GPM) Bantul Jalan Ki Pemanahan Nomor 10 Jagangrejo Pelemwulung Kapanewon Banguntapan, Jumat (19/3/2021).

Selanjutnya olahan masakan dimasukkan kotak. Mereka kemudian berkeliling membagikan nasi itu kepada yang membutuhkan. Tidak jarang dalam giat bakti sosial tersebut ada yang membawa anak guna melatih kepedulian sosial sejak dini.

"Setiap Jumat kita membagikan 200 hingga 300 boks nasi," kata Sony Maryanto, Ketua GPM Bantul di sela-sela kegiatan. Nasi dibagikan kepada tukang becak, pemulung, pedagang pinggir jalan dan siapa saja yang dinilai layak menerima.

Pembagian nasi kotak, lanjut Sony, dilakukan rutin sejak Mei 2020. Harapannya bisa memberikan kebahagiaan dan meringankan beban mereka untuk memenuhi makan pada siang atau sore hari Jumat.

"Kami berharap ini membawa kebahagiaan bagi penerima dan bentuk kepedulian GPM kepada sesama. Kita menyadari pandemi berdampak luar bisa bagi banyak orang. Ada yang kesulitan memenuhi kebutuhan hidup, termasuk untuk keb bbb utuhan makan. Semoga ini bermanfaat," katanya.

Kegiatan serupa akan terus dilakukan GPM secara swadaya. Donatur yang ingin berpartisipasi, dengan senang hati GPM akan menerima, mengelola dan membagikan kepada mereka yang berhak. "Dengan tangan terbuka kami menerima ketika ada yang akan ikut berkontribusi dalam kegiatan ini," katanya.

(sra)

SARIYATI WIJAYA/KORANBERNAS.ID

Anggota GPM Bantul membagikan nasi kotak.

Kala Anggota Brimob Berubah Jadi Pendidik

KORANBERNAS.ID, BANTUL -- Suasana sedikit berbeda tampak di kediaman Kepala Dusun Nglebeng Kalurahan Tamanan Kapanewon Banguntapan Bantul, Rabu (17/3/2021). Kala itu, seorang anggota Brimob Polda DIY mengajar murid Sekolah Dasar (SD) dan juga membantu siswa memecahkan soal mata pelajaran.

Lewat program Brimob Ramah Anak Indonesia atau disingkat Brain, Bharada Polisi El Dhoni mengerahkan kemampuannya mengajar anak-anak. Hal itu seperti berbanding terbalik dengan citra Brimob yang merupakan satuan elite Polri dan salah satu unit terdepan dalam penanganan kamtibmas.

Dansat Brimob Polda DIY Kombes Polisi Imam Suhadi mengatakan kebijakan Mabes Polri yang meluncurkan program Brain, merupakan bentuk kepedulian Polri kepada masyarakat terdampak pandemi.

"Dengan program ini, kami bisa membantu masyarakat yang kesulitan mengakses internet saat pembelajaran jarak jauh. Program Brain ini kami laksanakan di dua lokasi, untuk Batalyon A Pelopor di rumah Kepala Dusun Nglebeng Tamanan Banguntapan Bantul dan Batalyon B Pelopor di Aula Mako Batalyon B Pelopor Sentolo Kulonprogo," katanya.

ISTIMEWA

Anggota Brimob Polda DIY mengajar siswa SD.

Tak terasa, sudah hampir delapan bulan program Brain berjalan. Jajaran Brimob menanggalkan kesan garang dan tangguh yang mereka miliki, dan menjadi pendidik yang ramah bagi anak-anak.

"Memang pertama kali dicetuskan oleh Dankorbrimob Polri waktu itu, Irjen Pol Drs Anang Revandoko, pada awal Agustus tahun 2020. Hal ini sebagai wujud keprihatinan beliau banyak orang tua terkendala membimbing dan menfasilitasi anak-anaknya belajar dengan metode baru yaitu daring atau *online* yang terpaksa dilaksanakan pada masa pandemi Covid-19," papar Imam.

Patuhi protokol

Lewat program Brain, jajaran Brimob di daerah diminta menggunakan fasilitas kesatuan serta menjalin kerja sama dengan masyarakat ataupun instansi terkait demi mempermudah kegiatan belajar mengajar. Protokol kesehatan wajib dipatuhi anggota Brimob yang menjadi pendidik.

"Dalam pelaksanaan program Brain, Yon A Pelopor bekerja sama dengan Kepala Dusun Nglebeng yang kebetulan mempunyai sarana sekolah TK dan PAUD. Ruangan yang digunakan saat belajar berada di rumah kepala dusun dengan menggunakan 27 meja kursi milik dusun setempat. Tempat belajar kami lengkapi fasilitas wi-fi, tempat cuci tangan, *thermogun, handsanitizer* serta disediakan masker dari Satbrimob," tambahnya.

Selama hampir delapan bulan program Brain di Yogyakarta diampu oleh anggota Yon A Pelopor dan dibantu lima guru pendamping sukarela dengan sasaran siswa SD kelas 1-4 yang tinggal di sekitar Mako Yon A Pelopor, yang membutuhkan bantuan pendampingan belajar. Jumlah siswa setiap harinya, ujar Imam, berkisar antara 20 hingga 27 orang.

Sedangkan Batalyon B Pelopor di Sentolo, program Brain dilaksanakan setiap hari di Aula mako Yon B yang digunakan sebagai ruang belajar dan memanfaatkan 20 set meja kursi yang dipinjam dari SMPN 2 Sentolo. Di tempat ini juga dilengkapi fasilitas wifi dan perlengkapan protokol kesehatan yang disediakan Satbrimob.

"Sedangkan sasarannya yaitu siswa SD, SMP dan SMA sekitar lingkungan Mako Yon B yang kurang mampu dan siswa yang membutuhkan bimbingan belajar serta terkendala jaringan internet. Program ini diampu oleh anggota Yon B sendiri dengan bantuan mahasiswi PKN STAN dan UGM," tandas Dansat Brimob.

Kabid Humas Polda DIY Kombes Polisi Yuliyanto menerangkan, Brain menjadi salah satu bentuk program yang dikeluarkan Mabes Polri demi penangan pandemi. "Intinya agar Polri semakin dekat dengan masyarakat. Tidak melulu, polisi itu menangkap penjahat atau menjaga keamanan. Ini salah bentuk nyata kinerja Polri untuk masyarakat," ujarnya.

(ros)

Anggrek Jingga untuk Pejabat Kemenag

KORANBERNAS.ID, BANTUL – Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Bantul, Aidi Johansyah, merasa bangga saat menerima anggrek jingga dari Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 5 Bantul.

Itulah tanda mata kepada pejabat kantor itu, dalam rangka Hari Amal Bakti (HAB) ke-43 madrasah tersebut yang bertema *Menyatukan Langkah dalam Semangat Berkarya dan Beribadah*.

"Pelaksanaan HAB kami menerapkan protokol kesehatan dan dilaksanakan terbatas," kata Yuli Marhaeni, Humas MTsN 5 Bantul, Minggu (14/3/2021).

Kegiatan tersebut dihadiri 42 orang terdiri guru dan pegawai, pengawas, komite madrasah maupun peserta lomba yang berlangsung Sabtu (13/3/2021).

Sebelum puncak acara, rangkaian HAB ke-43 diisi khatmil Quran, bakti sosial kepada 10 GTT/PTT, 45 siswa tidak mampu dari SD/MI, 50 siswa MTs dan 12 warga magersari. Ada juga lomba pidato, adzan, tartil dan macapat.

Juara lomba pidato Fitri Risnasari (MTs), Aquini Aluna Puteri (SDN Kretek). Pemenang lomba adzan Muh Andika Afif (MTs), Muh Zhafran Maaly (SD Ar Raihan).

SARIYATI/KORANBERNAS.ID

Anggrek Jingga untuk Pejabat Kementerian Agama.

Pemenang lomba tartil Nur Azizah (MTs), Fadhilah Salsabila (SDN Giricahyo). Juara lomba macapat Alifah NurHidayati (MTs) serta Fadhia Zelda dari MI Maulana Magribi.

Mereka menerima hadiah secara simbolis di madrasah, sedangkan juara dua dan seterusnya diberikan lain hari.

Kepala MTsN 5 Bantul, Taviv Raharja, bersyukur dengan tingginya animo masyarakat memasukkan anaknya ke madrasah.

"Saya merasa senang dan bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah SWT karena pada tahun ini masyarakat sudah mempercayai madrasah. Terbukti antusias siswa masuk madrasah tinggi," katanya.

Sedangkan Aidi Johansyah mengatakan usia 43 tahun sudah melewati kepala empat. Luar biasa. Banyak menorehkan prestasi. Madrasah yang hebat dan bermartabat.

"Saya mengingatkan semangat baru Kementerian Agama dan semangat baru mengelola Kementerian Agama. Semangat baru Kementerian Agama diterjemahkan dengan beberapa kata kunci," katanya.

Pertama, penguatan moderasi beragama. Salah satu penekanannya pada penguatan literasi keagamaan, budaya toleransi dan nilai-nilai kebangsaan.

Kedua, menajemen pelayanan dan tata kelola birokrasi yang harus semakin baik, termasuk di dalamnya pelayanan penyelenggaraan haji dan umrah, pendidikan agama dan keagamaan, serta pusat pelayanan keagamaan.

Ketiga, persaudaraan yang meliputi merawat persaudaraan umat beragama, memelihara persaudaraan sebangsa dan setanah air dan mengembangkan persaudaraan kemanusiaan.

"Mari kita semua mengedepankan akal sehat dan hikmah/kebijaksanaan menyikapi berbagai persoalan keumatan dan kebangsaan saat ini maupun masa-masa yang akan datang," pesannya.

(sra)

Kaur Keuangan Pekerjaan yang tidak Ringan

KORANBERNAS.ID, BANTUL – Di mana pun, pekerjaan mengurus uang bukan perkara mudah. Tidak ringan. Banyak godaan. Sedikit saja tergiur bisa berujung korupsi atau penyalangunaan.

Tidak salah, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih berharap Kaur Danarta atau populer dengan istilah Kaur Keuangan memegang kuat tanggung jawabnya yang tidak ringan itu.

"Segala penatausahaan keuangan kalurahan dilakukan oleh mereka. Maka perlu adanya pemahaman yang sama bagaimana agar laporan keuangan itu akuntabel, transparan, bersih dan bebas korupsi," ujar bupati saat menghadiri bimbingan teknis (bimtek) *Bina Inovasi dan Potensi Kelurahan Melalui Strategi Pengelolaan Keuangan Akuntabel dan Inovatif*, Selasa (16/3/2021) di Gedung Induk Kompleks Parasamya.

Bupati mengapresiasi peran dan kinerja Kaur Danarta di seluruh Bantul. "Saya berikan apresiasi untuk para Kaur Danarta yang bersemangat ikut bimtek. Semoga Kalurahan kita menjadi kalurahan teladan memiliki kinerja baik sehingga menghadirkan kesejahteraan masyarakat secara optimal," kata Abdul Halim.

Bimtek dihadiri narasumber Munaryati selaku Pimpinan Cabang PT Bank BPD DIY, Kepala BKAD Bantul Trisna Manurung serta Kepala Inspektorat Bantul Hermawan Setiaji.

Narasumber lainnya, Kepala Dinas PPKBPMD setempat Sri Nuryanti, Kabag Administrasi Pemerintahan Desa, Kurniantoro dan perwakilan KPP Pratama Bantul, Agung Subhan Kurnianto.

Ketua Paguyuban Kaur Danarta, Hudi Wibowo, mengatakan pelatihan diikuti 75 Kaur Danarta dari 75 kalurahan se-Kabupaten Bantul.

"Kegiatan ini bertujuan untuk menambah bekal dan kemampuan dari Kaur Danarta dalam kaitan pengelolaan keuangan," katanya.

Bantuan dukuh

Bersama wabup, dirinya mencanangkan program pemberdayaan partisipatif masyarakat berbasis pedukuhan dengan bantuan sebesar Rp 50 juta per tahun. Program ini dilatarbelakangi ketimpangan keuangan daerah yang ditransfer ke kalurahan.

Bupati mengakui adanya perbedaan kalurahan yang mendapat Bantuan Keuangan Khusus (BKK). Dengan adanya bantuan ini diharapkan mampu menjembatani apa yang dibutuhkan masyarakat.

Merujuk peraturan bupati, dana tersebut digunakan untuk empat hal. Pertama, Infrastruktur seperti drainase dan pemasangan paving blok. Tidak boleh untuk corblok.

"Kita atur untuk pengerasan jalan dengan paving blok tidak boleh corblok. Ini karena corblok terbukti menurunkan tinggi permukaan air tanah di mana sekarang semakin menurun karena kurangnya resapan. Corblok menutup pori-pori tanah," katanya.

Kedua, persampahan. Fakta TPST Piyungan kewalahan menampung sampah, maka persoalan sampah hendaknya selesai di tingkat pedukuhan. Syukur tingkat rumah tangga dengan pola pemilahan sampah.

Ketiga, kesehatan. Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (AKI), *stunting*, Covid dan lain-lain harus diperhatikan. Ibu hamil harus mendapat dukungan asupan yang baik guna menjaga kondisinya.

"Kita ingin generasi yang tinggi, cerdas, tidak cebol, sehat juga. Maka memerangi *stunting* harus dilakukan sejak pranikah," kata bupati.

Produk digital

Keempat, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar anak bisa cerdas, tumbuh dengan baik dan terpenuhi hak-haknya sebagai penerus perjuangan bangsa.

"Pengaturan-pengaturan itu, dan pengaturan keuangan kalurahan secara keseluruhan memerlukan Kaur Danarta yang cekatan, memahami, inovatif. Danarta menjadi sangat diandalkan bagi kemajuan kalurahan dan Kabupaten Bantul yang kita cintai," katanya.

Dalam paparannya Munaryati mengatakan Bank BPD DIY merupakan BUMD milik Pemda DIY dan Pemda Kabupaten/Kota dengan aset saat ini Rp 14,7 triliun.

Bank ini terus mengembangkan produk digital yaitu Bank BPD *mobile bangking*, Bank BPD Qris Ultimate Automated Transaction (QUAT) yang dikhususkan untuk *merchant*, UMKM, masjid untuk donasi digital dan juga bisa untuk sumbangan-sumbangan yang muncul kanal QRIS serta bisa di-*scan* bank manapun.

(sra)

BOB Siapkan Tujuh Desa Wisata Sehat

KORANBERNAS.ID, PURWOREJO -- Badan Otoritas Borobudur (BOB) menyiapkan Wisata Sehat untuk tujuh desa di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ketujuh desa tersebut adalah Desa Pandanrejo Kecamatan Kaligesing, Desa Sedayu Kecamatan Loano, dan Desa Benowo Kecamatan yang semuanya di Kabupaten Purworejo, Jateng. Kemudian, Desa Ngargoretno di Kabupaten Magelang, serta Desa Ngargosari, Desa Gerbosari dan Desa Pagerharjo di Kabupaten Kulonprogo (DIY).

BOB membantu aktivasi destinasi melalui kegiatan pelatihan dan pendampingan sebagai bentuk Adaptasi Kebiasaan Baru destinasi pariwisata.

Direktur Destinasi Pariwisata BOB, Agustin Peranginangin, di sela acara Pelatihan dan Pendampingan Adaptasi Kebiasaan Baru Destinasi SDM Parekraf Jateng-DIY mengatakan, kegiatan tersebut merupakan program pariwisata sehat.

"Ini bukan kegiatan yang pertama. Karena ada pandemi Covid-19, ada revisi program. Pariwisata diharapkan tetap berjalan, tetapi harus menyesuaikan keadaan," kata Agustin di Bukit Siboetrong, Desa Pandanrejo, Kecamatan Kaligesing, Senin (15/3/2021).

WAHYU NUR ASMANI/KORANBERNAS.ID
Lima Penari Dolalak bermasker saat mengiringi tamu UIP menuju Bukit Siboetrong.

Menurut Agustin, kegiatan itu bukan hal baru. Namun kegiatan untuk penguatan bersih, indah dan aman. Penguatan bersih, indah dan aman yang terpenting bisa diimplementasikan. Selain itu, sumber daya manusia (SDM) harus ditingkatkan kapasitasnya. "SDM mampu memahami apa itu protokol kesehatan desitinasi," ujarnya.

Misalnya, bagaimana toiletnya agar pengunjung tidak berkerumun. Bangunan toilet harus berjarak agar pengunjung mudah untuk jaga jarak. Demikian juga dengan makanan. Saat pandemi, makanan harus tersaji secara tertutup.

Kegiatan pelatihan diawali dengan pembukaan secara resmi pada Senin, 15 Maret 2021 di Bukit Siboetrong, Desa Pandanrejo Kabupaten Purworejo, diikuti oleh 7 desa terpilih di Jateng dan DIY. Secara paralalel kegiatan diselenggarakan di 6 titik destinasi, masing masing desa terdiri dari 20 personal.

Kegiatan meliputi sosialisasi, pelatihan, pendampingan dan diakhiri dengan *self declare* sebagai bentuk komitmen dalam pelaksanaan protokol kesehatan di destinasi wisata pada 7 April 2021 mendatang. Penyusunan *self declare* setelah peserta mendapat materi selama dua hari dilanjutkan diskusi selama dua hari.

Pada kegiatan ini BOB berkolaborasi dengan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Jawa Tengah, Dinas Pariwisata DIY, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo, Dinas Pariwisata Kulonprogo serta Lembaga Sertifikasi Jana Dharma Indonesia.

Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas dan Promosi Pariwisata Dinparbud Purworejo, Dyah Woro, pada forum dialog mengatakan pihaknya mencoba melihat pandemi dari sisi positif.

"Kami melihat pandemi Covid-19 dengan membuat wisata dengan sasaran berbeda. Sasaran saat ini adalah wisata alami yang sehat dan aman," ujar Woro.

Menurutnya, selama pandemi tingkat kunjungan wisatawan di Bukit Siboetrong di Desa Pandanrejo, Kecamatan Kaligesing justru meningkat. "Untuk itulah, Bukit Siboetrong kami usulkan menjadi tempat *launching* Pelatihan Dan Pendampingan Adaptasi Kebiasaan Baru Destinasi SDM Parekraf Jateng-DIY," katanya. **(wna)**

Ada Kuliner Khas Ramadhan di Sheraton Mustika

KORANBERNAS.ID, YOGYAKARTA -- Tak ingin kehilangan momen Ramadhan 1442 H yang jatuh pada 12 April 2021, Sheraton Mustika Yogyakarta telah mempersiapkan hidangan berbuka puasa bagi semua kalangan. Sajian kuliner khas lokal dan Timur Tengah dapat dinikmati para tamu dewasa hingga para muda milenial dengan harga terjangkau.

"Paket buka puasa *all you can eat* ini dibanderol seharga Rp 144.200 nett/orang, tepat dengan angka tahun Ramadhan 1442 Hijriyah," terang Elvi Fitri Yanti kepada koranbernas.id, Kamis (18/3/2021).

"Ada tujuh paket menu yang akan dirolling bergantian selama satu minggu dalam sebulan. Semua menu andalan ini diracik oleh chef Areza yang memiliki kombinasi luar biasa dengan memadukan suasana yang menghangatkan hati dan memulihkan energi dari puasa sepanjang hari," lanjut Elvi.

Untuk memulai perjalanan kuliner, Androwino Bistro merekomendasikan pilihan makanan pembuka yang manis seperti Es Campur, Es Manado, Es Cendol, Es Degan dan Es Cantik Manis.

ISTIMEWA
Bartender memperagakan cara menghidangkan teh tarik di Kampung Ramadhan Nusantara, Sheraton Mustika Yogyakarta.

Selain itu, aneka jajanan gorengan seperti Tempe Mendoan, Tahu Berontak, Sukun Goreng, dan Bakwan Jagung juga akan ditawarkan untuk melengkapi buka puasa bersama para tamu.

"Tahun ini spesial. Keadaan masa pandemi membuat kami sangat *aware* terhadap kesehatan pengunjung. Tidak perlu kuatir, penerapan protokol kesehatan telah diberlakukan sejak tamu memasuki Sheraton," kata Elvi.

"Selain itu, pembatasan kapasitas resto juga dilakukan. Jika sebelum pandemi kami bisa membuka hingga tiga resto, kali ini dengan protokol jaga jarak dan pembatasan kapasitas, kami hanya membuka dua resto," imbuhnya.

Tahun ini pula, lanjut Elvi, ia ingin para milenial dan komunitas untuk tidak segan-segan melaksanakan buka bersama di Sheraton Mustika. Pihaknya siap dengan protokol kesehatan dan CHSE yang standar nasional.

Sambil menyantap hidangan yang bervariasi, para tamu juga disuguhkan atraksi langsung cara bartender dalam menyajikan Chai Tea dan Teh Tarik.

Chef Areza dan tim kulinernya akan menyiapkan beberapa warung makan untuk menghidangkan mie, sup, dan aneka ragam salad.

Tidak ketinggalan, di etalase pojok jajanan tersedia menu yang tak kalah menggiurkan, berupa Sate Taichan, Nasi Goreng, Tahu Gejrot, Pempek, dan Soto Betawi. **(rne)**